

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan atau transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. (Mardiasmo 2004:30).

Prinsip keterbukaan menghendaki agar penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara terbuka atau transparan, yaitu bahwa berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan harus jelas, tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan rahasia, tetapi segala sesuatunya baik perencanaan dan pertanggungjawabannya dapat diketahui oleh publik terkecuali untuk informasi yang memang bersifat terbatas dan ketat maka pemerintah dapat memberikan batasan ketika informasi tersebut diakses. (UU No. 14 Th. 2008).

Perwujudan tata pemerintahan yang baik telah mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggara pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator penyelenggaraan pemerintahan lainnya. Menurut Hari Sabarno (2007:38) transparansi

merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan banyak inovasi baru pada media komunikasi terutama dengan adanya internet dan ponsel cerdas yang semakin memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi hanya dengan menggerakkan jempol. Informasi yang tersedia di internet itu sangat beragam dan dalam berbagai bentuk baik berupa tulisan, gambar, suara, video sehingga masyarakat sekarang telah menjadikan media tersebut sebagai sarana untuk berbagai keperluan.

Menurut Everett M. Rogers (dalam Abrar, 2003:17-18) merangkumkan perkembangan media komunikasi ke dalam empat era. Pertama, era komunikasi tulisan, Kedua, era komunikasi cetak, Ketiga, era telekomunikasi, dan Keempat, era komunikasi interaktif. Media baru adalah media yang berkembang pada era komunikasi interaktif. Ron Rice mendefinisikan media baru adalah media teknologi komunikasi yang melibatkan komputer di dalamnya (baik mainframe, PC maupun Notebook) yang memfasilitasi penggunaanya untuk berinteraksi antar sesama pengguna ataupun dengan informasi yang diinginkan. Sementara menurut McQuail, media baru adalah tempat dimana seluruh pesan komunikasi terdesentralisasi; distribusi pesan lewat satelite meningkatkan penggunaan jaringan kabel dan komputer, keterlibatan audiens dalam proses komunikasi yang semakin meningkat.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara penyedia layanan publik tentu tidak boleh tertinggal dengan perkembangan internet yang semakin pesat ini dan harus segera memanfaatkannya agar pelayanan yang diberikan bisa semakin baik dan terjaga kualitasnya.

Salah satu langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah di Indonesia adalah dengan tersedianya website (situs elektronik) pemerintah hingga tingkat kabupaten kota yang memberikan informasi-informasi terkini tentang daerah tersebut termasuk dengan promosi-promosi sumber daya daerah. Website dari sebuah lembaga publik, adalah merupakan salah satu jendela utama bagi terciptanya keterbukaan informasi.

Keterbukaan Informasi yang semakin dibutuhkan oleh masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin memudahkan dalam memberi dan memperoleh informasi telah melahirkan sebuah gerakan bersama pemerintah dengan masyarakat untuk mewujudkan keterbukaan pemerintah dan percepatan perbaikan pelayanan publik sebagaimana sudah diamanahkan oleh UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Gerakan ini dikenal dengan nama Open Government Indonesia (OGI) yang merupakan bagian dari gerakan global Open Government Partnership (OGP) yang saat ini memiliki 60 Negara anggota (dan terus bertambah), dimana pada tahun 2013 Indonesia menjadi Lead Chair OGP. (opengovindonesia.org).

Komitmen pemerintah Indonesia tentang keterbukaan ini juga telah ditunjukkan oleh Presiden RI yang secara konsisten menegaskan keseriusan terhadap Open Government seperti yang disampaikan dalam pidato kenegaraan di bulan Agustus 2012 dimana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkata:

“Perluasan peran dan partisipasi publik (diperlukan) dalam pembangunan hingga membuka akses agar publik ikut mengawasi pembangunan. Inilah esensi Open Government.”

Pemerintahan yang terbuka tentu akan mendorong juga ketersediaan data yang bisa diakses oleh publik agar prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat bisa tercapai. Mengenai akuntabilitas dan transparansi, dengan terbukanya data, masyarakat akan dapat mengetahui dan menganalisis tentang detail informasi terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan pemerintah, seperti studi banding, pembelian-pembelian, tender, kontrak, kebijakan-kebijakan, dan sebagainya. Mengenai partisipasi masyarakat, dengan terbukanya data, masyarakat dapat mendayagunakan data tersebut untuk tujuan-tujuan positif, seperti riset, pendidikan, menciptakan produk dan layanan yang inovatif berdasarkan data, dan sebagainya. (wikipedia).

Penyediaan dan penggunaan data ini diharapkan dari peran aktif pemerintah dan masyarakat. Hubungan dua arah ini menggambarkan bahwa pemerintah dapat menyediakan data kepada masyarakat, dalam hal ini pemerintah bertindak sebagai penyedia dan masyarakat bertindak sebagai pengguna, serta sebaliknya, yakni masyarakat juga dapat

menyediakan data untuk pemerintah, dalam hal ini masyarakat bertindak sebagai penyedia dan pemerintah bertindak sebagai pengguna. Pertukaran data antara pemerintah dan masyarakat ini membentuk suatu cara komunikasi baru antara mereka.

Akses terhadap informasi, open government dan open data semakin mudah dengan pemanfaatan media komunikasi khususnya internet. Apalagi kemunculan open government dan open data itu sendiri diawali dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin pesat dan penggunaan yang semakin mudah. Kebutuhan akan keterbukaan pemerintah menuntut pemerintah proaktif dalam menerbitkan data pemerintahan di website, dapat diakses secara gratis, dan memiliki minimal keterbatasan dalam menggunakan atau mengakses kembali data-data tersebut serta memiliki lisensi yang jelas untuk mengatur penggunaan data tersebut atau penerbitan data di tempat lain.

Kebebasan dan keterbukaan tentu merupakan hal yang diharapkan banyak pihak. Sebaliknya, ketidakteraturan dan ketidakpastian menjadi sesuatu yang paling dihindari. Oleh karena itu kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersamaan. Kebebasan informasi, di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.

Salah satu langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk membuka keran keterbukaan ini adalah dengan membuka informasi pelaksanaan tender-tender proyek kepada publik agar memberikan kesempatan seluasnya pada siapa saja yang memiliki kompetensi untuk ikut terlibat dalam pekerjaan yang ditawarkan dan juga bisa ikut mengawasi jalannya pekerjaan.

Proses tender atau pelelangan dilakukan oleh para pihak yang secara hukum telah ditetapkan serta bersifat mandiri dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain diluar organisasi pengadaan. Hal ini untuk menjamin independensi pelaksana pemilihan penyedia agar dapat memilih penyedia maupun barang/jasa yang dibutuhkan secara profesional sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Peran pengawasan oleh masyarakat, termasuk wartawan dan LSM dilakukan tidak pada keseluruhan proses, namun dibatasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Keterbukaan dan Informasi Publik. Bahkan dalam UU KIP telah ditekankan bahwa kontrak merupakan salah satu informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Kontrak ini merupakan hasil dari pemilihan penyedia atau baru tersedia setelah proses lelang selesai dilaksanakan.

Tender yang terbuka akan memberikan informasi terutama dalam mengumumkan hasil pemilihan penyedia yang dapat diakses oleh siapapun. Hal ini dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam melakukan

pengontrolan pelaksanaan pengadaan oleh masyarakat secara terbuka termasuk menilai apakah alasan pengguguran peserta yang menawar dengan harga lebih rendah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) telah menyediakan media bagi semua pihak terutama pemerintah dalam pelaksanaan tender secara online. Media tersebut kita kenal dengan nama Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Untuk memanfaatkan media tersebut maka perlu dibentuk unit kerja yang disebut dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Sistem ini selalu tersedia selama 24 jam secara online memberikan informasi pada publik dan fasilitas yang dibutuhkan baik bagi penyedia ataupun bagi tim pengadaan agar proses tender berjalan dengan aman, baik, tertib dan transparan.

Sinjai sebagai salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan telah menerapkan tender melalui media online ini. Rafiuddin yang merupakan salah seorang tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Sinjai mengatakan bahwa sistem pengadaan memanfaatkan media online telah

diterapkan di Sinjai sejak tahun 2012. Hal ini dilakukan karena sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Selain sistem yang disediakan oleh LKPP, LPSE Sinjai juga memanfaatkan situs resmi pemerintah kabupaten untuk memberikan informasi terkait tender terutama jika ada masalah yang bersifat teknis pada media SPSE itu sendiri.

Hingga saat ini, penggunaan media online dalam proses tender telah menjadi suatu keharusan apalagi dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang melengkapi aturan sebelumnya.

Kabupaten Sinjai sendiri telah lama melakukan sosialisasi pemanfaatan media online pada masyarakatnya, hal ini bisa dilihat dengan tersedianya beberapa titik hotspot gratis atau tempat untuk mengakses internet melalui jaringan nirkabel pada tempat-tempat umum serta laboratorium internet dengan bentuk seperti warung internet yang bisa diakses secara gratis oleh masyarakat.

Ruangan LPSE di kantor Dinas Kominfo Sinjai telah dilengkapi dengan beberapa unit PC yang bisa dimanfaatkan oleh para penyedia untuk belajar memanfaatkan media online dan melakukan proses penawaran lelang.

Pemkab Sinjai melalui Dinas Kominfo Sinjai telah memfasilitasi pengadaan jaringan internet ke semua kecamatan. Secara infrastruktur

komunikasi, Kabupaten Sinjai telah menyediakan berbagai sarana yang bisa memudahkan masyarakat untuk memanfaatkan media online untuk memperoleh informasi ataupun memberi informasi. Namun yang menjadi hambatan adalah jaringan listrik yang belum merata terutama ke daerah pulau-pulau dan pesisir yang merupakan bagian dari kecamatan Pulau Sembilan. Pemanfaatan media online tentunya membutuhkan listrik untuk menghidupkan peralatan.

Listrik di kecamatan Pulau Sembilan telah menjadi salah satu kebutuhan yang sulit untuk dipenuhi karena PLN belum menyediakan transmisi listrik bawah laut di Sinjai. Untuk mengantisipasinya maka pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Pertambangan dan Energi melakukan survey dan melihat bahwa panas matahari di Pulau Sembilan sangat cocok untuk pembangkitan tenaga listrik.

Saat ini, listrik yang ada di Pulau Sembilan dari swadaya masyarakat dan iuran bulanan yang menyediakan genset bersama. Rata-rata listrik hanya menyala pukul 18.00 hingga pukul 22.00. Saat siang tidak ada listrik sama sekali di rumah warga.

Kebutuhan akan listrik ini telah disuarakan oleh masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) dari tingkat kecamatan hingga kabupaten. Hasilnya adalah dibukanya tender untuk pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Pulau Sembilan. Pelaksanaan tender ini telah dilakukan secara online dan telah

mengundang banyak penyedia yang punya kualifikasi. Ini bisa kita lihat dari catatan di situs lpse.sinjaikab.go.id dan juga di website sinjaikab.go.id.

Salah satu dampak yang terjadi setelah tender PLTS berlangsung selain dengan terlaksananya proyek dengan baik adalah ditetapkannya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai tersangka karena telah menandatangani pencairan proyek. (rakyatsulsel.com). Kasus ini menyebabkan peneliti merasa penasaran apakah ini salah satu efek keterbukaan informasi tender melalui media online atau bukan.

Hal lain yang menjadi pertanyaan adalah pada tender PLTS yang dilakukan tahun 2013, proses pengadaan berlangsung normal sesuai dengan aturan. Nilai anggaran sebesar 3.02 Milyar dan masuk dalam kategori pengadaan konstruksi. Namun ada tender PLTS yang diulang hingga tiga kali dan dalam pengumumannya mengundang penyedia yang disebut namanya dan tidak terbuka untuk semua.

Berdasarkan paparan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Unit Layanan Pengadaan, Penyedia Barang dan Jasa, Masyarakat serta Auditor memanfaatkan media online dalam pelaksanaan tender dengan mengambil contoh pada pengadaan PLTS di Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai sehingga memilih judul “Penggunaan Media Online dalam Lelang Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai (Studi Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Menciptakan Open Government dan Open Data Informasi Publik)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penggunaan media online di Pemkab Sinjai dalam pelaksanaan proses tender Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Pulau Sembilan ?
2. Bagaimana bentuk transparansi yang bisa diciptakan dengan cara tender online pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya ?
3. Faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat pelaksanaan tender online PLTS di Pulau Sembilan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menggambarkan media online di Kabupaten Sinjai dan pemafaatannya dalam proses tender PLTS di Pulau Sembilan.
2. Menjelaskan transparansi yang diciptakan dengan melakukan tender secara online pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya.
3. Mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pemanfaatan media online pada pelaksanaan tender Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Pulau Sembilan.

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu komunikasi dan menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian lanjutan tentang penggunaan media online, open government, open data, keterbukaan informasi dan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi pemerintah untuk peningkatan pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui media online dalam mengelola dan mewujudkan open government yang semakin baik di Kabupaten Sinjai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Konsep

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Teknologi memegang peranan penting dalam proses dan praktik komunikasi ditengah masyarakat industri yang tengah bertransformasi menjadi masyarakat informasi. Teknologi tak hanya sebagai sarana untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, teknologi juga membuka kebiasaan baru bagi manusia dalam berkomunikasi.

Komunikasi itu sendiri adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang yang mengatur lingkungannya dengan (1) membangun hubungan antara sesama manusia; (2) melalui pertukaran informasi; (3) untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain; serta (4) berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu. (Book, 1980) dalam Cangara (2014:21).

Kini teknologi komunikasi berkembang begitu pesat seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Para ahli mulai tak hanya menciptakan perangkat keras maupun perangkat lunak teknologi tetapi para pemahamamn mengenai teknologi komunikasi banyak mendapat

sorotan ahli komunikasi. Salah satunya adalah Everet M. Rogers (1986:2) melihat bahwa teknologi komunikasi merupakan perangkat keras dalam struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses dan melakukan saling tukar informasi dalam individu yang lain.

Definisi Rogers memberikan pandangan bahwa telekomunikasi memiliki beberapa karakteristik. Pertama, teknologin berkaitan dengan perangkat keras atau alat. Kedua, teknologi berkomunikasi muncul dalam suatu struktur ekonomi, sosial dan politik tertentu. Ketiga, teknologi komunikasi membawa nilai-nilai tertentu dari struktur di atas. Keempat, teknologi berhubungan dengan perangkat keras di bidang komunikasi.

Untuk menandai kemunculan adanya teknologi komunikasi baru, Rogers menguraikan tiga ciri utama yaitu :

- a. Kemampuan sistem komunikasi baru (interactivity).
- b. Kontrol atau pengendalian sistem komunikasi massa biasanya berpindah dari produsen pesan kepada konsumen media (demassification).
- c. Teknologi komunikasi baru mempunyai kemampuan mengirimkan dan menerima pesan pada waktu-waktu yang dikehendaki setiap individu peserta (asynchronous).

Severin dan Tankard (2007: 305) mengatakan bahwa teknologi komunikasi berubah dengan begitu cepat sehingga banyak orang

berbicara tentang “revolusi teknologi” atau “ledakan informasi”. Beberapa teknologi baru yang sedang dalam proses pengembangan atau yang ada sekarang adalah vide tape recorder, video cassette, televisi kabel, surat kabar online, akses pelayanan informasi komputer dengan komputer pribadi di rumah, internet, world wide web, serta CD-ROM. Banyak teknologi yang mempunyai dampak dramatis yaitu memberikan pengguna kontrol yang jauh lebih banyak pada proses telekomunikasi dan informasi yang diterima.

2. Media Online

Media terus melakukan inovasi-inovasi baru sesuai dengan perkembangan dunia teknologi dan komunikasi. Inovasi-inovasi mengubah cara pandang dan kegunaan masyarakat dari media konvensional atau media mainstream menjadi media baru berbasis digital dan Online (sering kita sebut dengan *New Media*).

New Media muncul pada tahun 1990 dengan terbitnya buku “The Second Media Age” yang menggambarkan munculnya teknologi interaktif dan komunikasi jejaring (*network communication*), khususnya internet yang akan mengubah kehidupan masyarakat dalam berkomunikasi. (Cangara: 2014).

New Media didefinisikan sebagai media yang didalamnya terdiri dari gabungan berbagai elemen. Elemen tersebut adalah gabungan data, teks, suara dan berbagai gambar yang disimpan dalam format

digital dan disebarluaskan melalui jaringan berbasis kabel optik *broadband*, satelit dan sistem gelombang mikro (Flew, 2008: 2-3).

Flew menyatakan media baru atau bentuk informasi digital sejenis memiliki karakteristik :

- a. *Manipulable*, informasi digital mudah diubah dan diadaptasi dalam berbagai bentuk, penyimpanan, pengiriman dan penggunaan.
- b. *Networkable*, informasi digital dapat dibagi dan dipertukarkan dalam secara terus-menerus oleh sejumlah besar pengguna di seluruh dunia.
- c. *Dance*, informasi digital berukuran besar dapat disimpan di ruang penyimpanan kecil (contoh usb, hardisk eksternal, flashdisk atau penyedia layanan jaringan)
- d. *Compressible* ukuran informasi digital yang diperoleh dari jaringan maupun melalui media penyimpanan dapat diperkecil melalui proses kompres dan dapat didekompres kembali saat dibutuhkan.
- e. *Impartial*, informasi digital yang disebarluaskan melalui jaringan bentuknya sama dengan yang direpresentasikan dan digunakan pemilik atau pembuatnya.

Leah A. Lievrouw dan Sonia Livingstone dalam *Handbook of New Media* (Sage: 2006) berpendapat bahwa produk dapat dikatakan new media apabila memenuhi empat kriteria dan tiga elemen dasar.

Keempat kriteria itu adalah :

- a. *Computing and Information Technology*, sebuah medium (media massa) setidaknya harus memiliki unsur informasi, komunikasi dan teknologi di dalam tubuhnya secara utuh.
- b. *Communication Network*, memiliki kemampuan untuk membentuk sebuah jaringan komunikasi antar penggunanya.
- c. *Digitized media and Content*, apabila media massa tersebut mampu menyajikan sebuah media dan konten yang sifatnya digital.
- d. *Convergence*, mampu berinteraksi dengan media-media lain (baik tradisional maupun modern) karena inti dari konvergensi adalah integrasi antara media yang satu dengan media yang lainnya.

Sedangkan menurut Denis McQuail (2010) dalam Cangara (2014 : 152), terdapat beberapa perubahan penting yang berhubungan dengan munculnya media baru yaitu:

- a. Digitalisasi dan konvergensi semua aspek dari media
- b. Interaktifitas dan konektifitas jejaring yang meningkat
- c. Mobilitas pada delokasi pengiriman dan penerimaan (pesan)
- d. Adaptasi publikasi dan peran-peran khalayak
- e. Munculnya beragam bentuk baru dari “media gateway” yaitu pintu masuk untuk mengakses informasi pada web atau untuk mengakses web itu sendiri.
- f. Fragmentasi dan kaburnya “institusi media”

Media baru terus melakukan metamorfosis sesuai dengan perkembangan teknologi media baru. MaQuail dan Leah A. Lievrouw

juga Sonia Livingstone mengatakan bahwa konvergensi adalah ruang media berinteraksi dengan media yang lain. Konvergensi akan mengarah pada penciptaan produk-produk yang aplikatif yang mampu melakukan fungsi audiovisual sekaligus komputerisasi. Modifikasi komputer saat ini bisa difungsikan sebagai pesawat televisi bahkan komputer dalam genggaman melalui telepon genggam dan terjadi korespondensi surat, data maupun gambar melalui koneksi (3G) bahkan sekarang telah berkembang menjadi 4G.

Konvergensi media mengalami perubahan paradigma. Van Dijk (1990), paradigma itu terlekat pada perbedaan arsitektural antara broadcast dan network berdasarkan perbedaan sejarah. Perspektif konvergensi sudut pandang konvergensi industri, konvergensi medium sampai ke konvergensi teknologi-teknologi media secara individual. Teknologi dapat dilihat dari level infrastruktur (hubungan transmisi fiber optik, mikrowave, satelit) atau transportasi (berkaitan dengan isi (konten) yang ditransportasikan dengan cara baru seperti lewat internet pada televisi atau webcasting). Layanan ini ditemukan pada telepon, hiburan internet, data dan visual data. Semuanya terintegrasi di bawah payung konvergensi. Konvergensi dalam pandangan Van Dijk, adalah berbagai bentuk integrasi telekomunikasi, komunikasi data dan komunikasi massa.

Secara fungsional, konvergensi terjadi pada produk-produk media digital, seperti ponsel yang menggabungkan antara kamera

digital, televisi, internet. Pada level teknologi, konvergensi hanya dimungkinkan oleh konvergensi industri, hasil dari kolaborasi antara korporasi dan telekomunikasi, media dan IT atau gabungan semuanya. Hubungan antara konvergensi korporasi dan teknologi sangat dinamis dan terjadi dalam dua arah.

Pada akhirnya, konvergensi antara broadcast (penyiaran) dan networking (jaringan) sebagai medium, Van Dijk (1999) disebut sebagai the second communication revolution (revolusi komunikasi kedua). Revolusi ini medium-medium tua atau teknologi analog digunakan kembali dengan dua cara sebagai interaktif dan secara digital. Digitalisasi ini menurut Flew (2008:10-11) adalah cara membuat platform dan media bisa saling dioperasikan dan bisa di-network-kan (David Holmes, 135 - 136).

Media dapat diartikan dengan saluran atau alat, sedangkan online istilah bahasa dalam internet yang artinya sebuah informasi yang dapat diakses dimana saja selama ada jaringan internet (Zabidina, dalam <http://google.co.id/media-onlie/doc.html>). Sudiana (2000) dalam Nurlati (2001) yang dikutip oleh Vini Winarti Halim (2006:26), mendefinisikan media online sebagai media pemberitaan yang terbit secara online di internet.

Walaupun istilah media online sudah sering dipergunakan oleh para pengguna jasa teknologi informasi dan teknologi komunikasi namun belum banyak ahli komunikasi yang memberikan definisi secara

jelas untuk istilah media online. Seperti yang utarakan oleh Astri Lestari (2004) dan dikutip oleh Vini Winarti Halim (2006:26) berikut ini:

“Hingga saat ini belum ada yang mendefinisikan pengertian media online secara spesifik. Namun menurut kamus Bahasa Indonesia, pengertian media adalah semua peralatan yang dipergunakan orang untuk menyampaikan sesuatu/informasi/gagasan/ atau ide kepada orang lain. Sedangkan pengertian online (dari bahasa Inggris dan terbentuk dari dua kata yaitu on dan line) menurut Kamus Bahasa Inggris adalah pada jalur atau garis. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian media online adalah alat untuk menyampaikan informasi atau gagasan atau ide kepada khalayak melalui jalur atau garis yang dikenal dengan jaringan tanpa kabel.”

Media online adalah media yang terbit di dunia maya, istilah dunia maya pertama kali dikenalkan oleh William Gibson (1984/1994) dalam novelnya yang mengartikan dunia maya yaitu realita yang terhubung secara global, didukung komputer, berakses komputer, multidimensi, artificial, atau virtual (Severin dan James W. Tankard, 2007:445).

Menurut buku Jurnalistik Terapan yang ditulis oleh Syarifudin Yunus (2010: 27) mengatakan: Media online yaitu media internet, seperti website, blog, dan lainnya yang terbit/tayang di dunia maya, dapat dibaca dan dilihat di internet. Media online merupakan pemain baru dalam kancah pers Indonesia, menurut beberapa sumber media online di Indonesia telah tumbuh sejak tahun 1994.

Sedangkan pendapat Vini Winarti Halim (2006: 27) mengenai media online yaitu: Media online yaitu website/situs yang difungsikan

sebagai media komunikasi elektronik yang tidak terikat ruang dan waktu dengan tujuan untuk memberikan informasi aktual yang dapat diakses oleh publik secara in real time.

Kelebihan lain dari media online dibahas oleh Wahyu Dhyatmika (2016) dalam tulisannya di indonesiana.tempo.co adalah :

- a. Lebih Konprehensif, Sebuah berita di era digital tak hanya terdiri dari teks dan foto, tapi juga tautan ke semua peristiwa sebelumnya yang mengawali momen termutakhir yang kita beritakan.
- b. Lebih otentik, akurat dan akuntabel, bisa menampilkan realitas secara utuh lengkap dengan foto dan video ataupun rekaman suara.
- c. Big Data atau kemampuan menyimpan dan menampilkan data dalam jumlah besar, Semua angka-angka hasil survei kesehatan, survei demografi, sensus, angka-angka hasil pemantauan bertahun-tahun kini sudah banyak tersedia sebagai data digital terbuka (open data) dan dengan mudah dapat diakses di internet.
- d. Interaktifitas, kemampuannya untuk terhubung langsung dengan pembaca.

Media online saat ini sudah tidak terbatas pada website atau situs tertentu saja karena perkembangan teknologi web yang sudah sampai ke tingkat web 3.0 menjadikan media semakin interaktif dalam memberi informasi. Perkembangan media sosial yang semakin tinggi begitu juga bermunculannya aplikasi-aplikasi online yang semakin banyak.

3. Transparansi

Transparansi seperti yang digunakan dalam istilah politik berarti keterbukaan dan pertanggung-jawaban. Aturan dan prosedur transparan biasanya diberlakukan untuk membuat pejabat pemerintah bertanggung-jawab dan untuk memerangi korupsi. Bila rapat pemerintah dibuka kepada umum dan media massa, bila anggaran dan laporan keuangan bisa diperiksa oleh siapa saja, bila undang-undang, aturan, dan keputusan terbuka untuk didiskusikan, semuanya akan terlihat transparan dan akan lebih kecil kemungkinan pemerintah untuk menyalahgunakannya untuk kepentingan sendiri. (wikipedia).

Transparansi atau keterbukaan berarti keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh lembaga. Transparansi juga bisa berarti bahwa informasi yang berkaitan dengan organisasi tersedia secara mudah dan bebas serta bisa diakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Kalaupun ada informasi yang tidak boleh diketahui oleh publik, yang sering disebut dengan “rahasia perusahaan”, maka harus ada kriteria yang jelas untuk itu. Keterbukaan juga bisa berarti informasi yang cukup berkaitan dengan kinerja lembaga tersedia dan disajikan dalam bentuk atau media yang mudah dipahami masyarakat.

Banyak pihak yang menyatakan bahwa transparansi terkait erat dengan akuntabilitas. Ada yang menyatakan bahwa keduanya

merupakan hubungan kausalitas, sementara kalangan yang lainnya menempatkannya secara independen. Menyangkut materi dan ruang lingkupnya, beberapa kelompok juga memiliki pandangan yang berbeda. Ada yang berpendapat bahwa transparansi dan akuntabilitas cukup pada aspek keuangan, ada yang berpendapat sebaliknya, semua aspek kecuali masalah keuangan, dan ada juga yang berpendapat semua aspek, termasuk program dan keuangan. Sementara kata kunci yang bisa menjelaskan sekaligus menghubungkan akuntabilitas dan transparansi adalah pengungkapan (disclosure). Pengungkapan data dan informasi merupakan praktik transparansi di satu sisi dan pada saat yang sama menjadi prasyarat akuntabilitas. (lingkarism.com).

Rahmawati (2014) memaparkan beberapa makna transparansi dan pemerintahan seperti berikut:

1. Transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif. Kristianten (2006:31).
2. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. Lalolo (2003:13).

3. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat. Mustopa Didjaja (2003 :261)

Rahmawati (2014) juga mengemukakan 6 prinsip transparansi yang dirilis oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dalam yaitu :

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
4. Laporan tahunan.
5. Website atau media publikasi organisasi.
6. Pedoman dalam penyebaran informasi.

4. Lelang/Tender Online

Tender online atau E-procurement adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang memanfaatkan teknologi informasi. Teknologi informasi digunakan untuk melakukan pengolahan data pengadaan hingga ke proses pembuatan laporan. E-procurement merupakan istilah umum diterapkan pada penggunaan sistem yang terintegrasi antara database dengan area yang luas (biasanya berbasis web) jaringan

sistem komunikasi disebagian atau seluruh proses pembelian. Proses pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan awal dan spesifikasi oleh pengguna, melalui pencarian, sumber dan tahap negosiasi kontrak, pemesanan dan termasuk mekanisme yang meregistrasi penerimaan, pembayaran dan sebagai pendukung evaluasi pasca pengadaan.

Dalam kegiatan publik baik di dalam pemerintahan maupun perusahaan (usaha swasta) selalu diperlukan barang/jasa untuk keperluan operasional yang bersifat rutin seperti bahan baku, bahan penolong (supplies), suku cadang, barang jadi, dan barang modal (kapital) seperti bangunan, mesin dan peralatan lainnya.

Menurut daftar kata X-Solutions : E-procurement merupakan sebuah istilah dari pengadaan (procurement) atau pembelian secara elektronik. E-procurement merupakan bagian dari e-bisnis dan digunakan untuk mendesain proses pengadaan berbasis internet yang dioptimalkan dalam sebuah perusahaan. E-procurement tidak hanya terkait dengan proses pembelian itu saja tetapi juga meliputi negosiasi-negosiasi elektronik dan pengambilan keputusan atas kontrak-kontrak dengan pemasok. Karena proses pembelian disederhanakan dengan penanganan elektronik untuk tugas-tugas yang berhubungan dengan operasi, tugas-tugas yang berhubungan dengan strategi dapat diberi peran yang lebih penting dalam proses tersebut. Tugas-tugas baru yang berhubungan dengan strategi pembelian ini meliputi manajemen kontrak kepada pemasok lama maupun baru serta penciptaan struktur

pasar baru dengan secara aktif mengkonsolidasikan sisi pemasokan/suplai. Sedangkan procurement system adalah sistem perangkat lunak untuk pembelian secara elektronik, yaitu pengadaan barang dan jasa.

LPSE KABUPATEN SINJAI
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Home | Tentang Kami | Tanya Jawab | Regulasi | Site Map | Kontak Kami

Jika website LPSE tidak dapat diakses dapat menggunakan

Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 4

LPSE menyelenggarakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Perusahaan / Penyedia Anda dapat mengikuti pengadaan dengan terlebih dahulu mendaftar sebagai penyedia barang/jasa. Informasi lebih lanjut silakan kontak kami.
Penting : Semua pengguna sistem ini terikat dengan Pakta Integritas. Untuk penjelasan lebih lanjut baca Persyaratan dan Ketentuan.

e-Procurement
LELANG SECARA ELEKTRONIK

No	Nama Paket	Agency	HPS	Tanggal Download
1	Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan (Lelang 2)	PEMKAB SINJAI	119 jt	21 Mar - 28 Mar 2016
2	Pengawasan Lanjutan Pembangunan Islamic Centre	PEMKAB SINJAI	69,52 jt	17 Mar - 24 Mar 2016
3	Pengawasan Pembangunan/Perluasan Kantor Bupati Sinjai	PEMKAB SINJAI	115 jt	17 Mar - 24 Mar 2016
4	Penyediaan Makan Minum Dokter Jaga dan Petugas Jaga	PEMKAB SINJAI	921,98 jt	16 Mar - 22 Mar 2016

Pengumuman
PENGADAAAN

Berita
TENTANG PENGADAAAN

01 Agustus 2015 21:54
Pengumuman Pemenang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Ibadah

01 Agustus 2015 21:52
Pengumuman Pemenang Kegiatan Pembangunan Tugu

24 Juni 2014 13:01
Pengumuman Gangguan Teknis Layanan SPSE

24 Juni 2014 12:47

24 Februari 2016 10:44
LINK ALTERNATIF LPSE KAB. SINJAI : 118.97.47.10

12 Februari 2016 20:55
Gangguan teknis LPSE

12 Februari 2015 09:12
Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)

09 Februari 2015 15:11
Pemberitahuan calon rekanan

Total Pengunjung: 329.903

Login Penyedia
Login Non-Penyedia

Cari

- Cari Lelang Non Eproc
- Cari Paket Lelang
- Cari Pemenang Lelang

Special Content

- Syarat Verifikasi Rekanan
- Form Permintaan Ubah Email Rekanan

Gambar 2.1

Tampilan Media Online LPSE Sinjai

Kebutuhan barang/jasa tidak dapat dihindarkan untuk menjaga kelancaran operasional dan untuk menjamin pertumbuhan, dimana untuk mendapatkannya tidak dapat diperoleh secara instan, tetapi

diperlukan tenggang waktu. Tenggang waktu tersebut dimulai dari saat melakukan pemesanan, waktu untuk memproduksinya, waktu untuk mengantarkan barang, bahkan sampai dengan waktu untuk memproses barang di gudang hingga siap digunakan oleh pemakainya.

Berbagai rumusan tentang definisi pengadaan telah banyak dikemukakan oleh para pakar, diantaranya Arrowsmith (2004), Nur Bahagia (2006), Christopher & Schooner (2007) dan sebagainya, pada prinsipnya, pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan barang, atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Yang dimaksud barang disini meliputi peralatan dan juga bangunan baik untuk kepentingan publik maupun privat.

Menurut Edquist et al (2000) pada prinsipnya, pengadaan publik (Public Procurement) adalah proses akuisisi yang dilakukan oleh pemerintah dan institusi publik untuk mendapatkan barang (goods), bangunan (works), dan jasa (services) secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Dalam hal ini, pengguna bisa individu (pejabat), unit organisasi (dinas, fakultas, dsb), atau kelompok masyarakat luas.

Dari pengertian ini maka yang dimaksud dengan public procurement ditentukan oleh siapa yang melaksanakan pengadaan bukan oleh obyek dari barang/jasanya. Bila dilakukan oleh pemerintah dan institusi publik maka dikategorikan sebagai public procurement,

namun jika dilakukan oleh institusi privat (swasta) maka dikategorikan sebagai private procurement. Dalam hal ini jika institusi pemerintah maka istilah pengadaan pemerintah (government procurement) akan lebih sesuai.

Berdasarkan atas penggunaannya, Edquist et all (2000) membedakan *public procurement* atas *direct procurement* dan *catalic procurement*. Pada *direct public procurement*, Institusi Publik menjadi Pelaksana Pengadaan sekaligus merupakan pengguna dari barang/jasa yang diadakan, oleh sebab itu secara intrinsik motivasi kebutuhan dan pengusulan pengadaan berasal dari Pelaksana Pengadaan yang sekaligus juga penggunaannya.

Sedangkan pada *catalic procurement*, Pelaksana Pengadaan melakukan pengadaan atas nama dan untuk pengguna barang/jasa, namun motivasi kebutuhan dan pengusulan pengadaan berasal dari Pelaksana Pengadaan bukan dari penggunaannya.

Selain kedua tipe pengadaan tersebut, dikenal pula tipe campuran yang disebut *cooperative public procurement*, dimana Pelaksana Pengadaan melakukan pengadaan atas nama dan untuk pengguna barang/jasa, namun motivasi kebutuhan dan pengusulan pengadaan berasal dari pengguna atau motivasi kebutuhan dari pengguna dan pengusulan pengadaan dan pelaksanaan pengadaan dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan.

E-Procurement sebagai suatu sistem informasi merupakan suatu sinergi antara data, mesin pengolah data (yang biasanya meliputi komputer, program aplikasi dan jaringan) dan manusia untuk menghasilkan informasi.

Hardware dan Software : Sebagai mesin dan aplikasi / sistem operasi yang bertujuan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan proses pengadaan. Network : Adalah infrastruktur jaringan komputer yang mendukung terjadinya proses e-procurement baik berupa jaringan intranet maupun internet. Brainware : adalah sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam bidang pengadaan barang, yang nantinya akan menjadi panitia pengadaan serta operator dari sistem e-procurement.

Prinsip Dasar Pengadaan:

a. Transparan

Semua ketentuan dan informasi, baik teknis maupun administratif termasuk tata cara peninjauan, hasil peninjauan, dan penetapan Penyedia Barang/Jasa harus bersifat terbuka bagi Penyedia Barang/Jasa yang berminat dan mampu tanpa diskriminasi.

b. Adil

Tidak diskriminatif dalam memberikan perlakuan bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara atau alasan apa pun.

c. Bertanggung jawab

Mencapai sasaran baik fisik, kualitas, kegunaan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip dan kebijakan serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

d. Efektif

Sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pihak terkait.

e. Efisien

Menggunakan dana, daya, dan fasilitas secara optimum untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan biaya yang wajar dan tepat pada waktunya.

f. Kehati-hatian

Berarti senantiasa memperhatikan atau patut menduga terhadap informasi, tindakan, atau bentuk apapun sebagai langkah antisipasi untuk menghindari kerugian material dan imaterial selama pro-ses pengadaan, proses pelaksanaan pekerjaan, dan paska pelaksanaan pekerjaan.

g. Kemandirian

Berarti suatu keadaan dimana pengadaan barang/jasa dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

h. Integritas

Berarti pelaksana pengadaan barang/jasa harus berkomitmen penuh untuk memenuhi etika pengadaan.

i. Good Corporate Governance

Memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Dalam pasal 131 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012. K/L/D/I mulai menggunakan *e-Procurement* dalam Pengadaan Barang/Jasa disesuaikan dengan kebutuhan.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-pengadaan) akan meningkatkan transparansi, sehingga persaingan sehat antar pelaku usaha dapat lebih cepat terdorong. Dengan demikian optimalisasi dan efisiensi belanja negara segera dapat diwujudkan.

Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) merupakan lembaga di dalam organisasi pemerintahan yang bertugas menyediakan fasilitas dan infrastruktur pengadaan yang memungkinkan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik, termasuk menjalankan fungsi verifikasi terhadap perusahaan-perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

5. Informasi Publik

Modernisasi dengan teknologi informasi dan komunikasi memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat. Ditambah lagi dengan era reformasi yang ditandai dengan adanya tuntutan akan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Dengan keadaan tersebut, pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi-informasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan serta mudah diakses dari mana saja. Terlebih lagi dengan adanya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka pemerintah diamanatkan untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Menurut UU KIP, yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dengan adanya amanat UU Keterbukaan Informasi Publik maka seluruh instansi pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/kota) diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebaran informasi terkecuali jenis informasi yang mendapatkan pengecualian oleh undang-undang. Penyediaan informasi oleh badan publik pemerintah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pejabat PPID bertanggung jawab pada penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Agar keterbukaan informasi publik berjalan sebagaimana mestinya, maka dibentuklah Komisi Informasi. Komisi Informasi ini juga merupakan pelaksanaan lanjutan terkait UU KIP. Komisi ini bertugas untuk menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi disamping berfungsi menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Keterbukaan informasi memberi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya clean and good governance karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan dan akuntabel. Mengenai mekanisme untuk mendapatkan informasi dapat dibaca pada artikel Mekanisme Keterbukaan Informasi Publik.

Kebebasan informasi diharapkan menjadi spirit demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersamaan. Kebebasan informasi, di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi secara luas. Sementara di sisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan secara strategis.

Undang-undang ini adalah peraturan yang dibuat untuk menjamin pemenuhan hak-hak publik dibidang keterbukaan informasi. Didalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) ini memuat pokok-pokok materi yang terdiri atas pengertian-pengertian yang terkait dengan informasi dan badan-badan publik, hak dan kewajiban badan publik, hal-hal yang terkait dengan Komisi Informasi sebagai lembaga independen yang ditugaskan untuk mengawal pelaksanaan keterbukaan informasi, mekanisme memperoleh informasi dan sanksi hukum atas pelanggaran badan publik, pemohon atau pengguna informasi. Badan-badan publik yang dimaksudkan dalam Undang-Undang ini mencakup lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, organisasi masyarakat maupun organisasi politik yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya memanfaatkan dana dari APBN/APBD baik sebagian maupun seluruhnya atau dana yang bersumber dari sumbangan masyarakat atau dari luar negeri.

Adapun pada bagian ke-empat pada Undang-Undang KIP, pasal 9 hingga pasal 11 terdapat ketentuan mengenai informasi apa yang disampaikan oleh setiap badan publik di Indonesia adalah :

- a. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala/regular (pasal 9) :
 1. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 3. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (pasal 10)
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat (pasal 11)

Undang-Undang KIP yang secara efektif mulai berlaku pada bulan Mei 2010 merupakan momentum bagi perkembangan keterbukaan dan demokrasi di Indonesia. Undang-undang ini mengatur pemenuhan kebutuhan informasi yang terkait dengan kepentingan publik, yaitu mengamanatkan kepada badan publik negara dan badan publik non pemerintah untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, sekaligus untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kehadiran Undang-undang itu juga memberikan penegasan bahwa keterbukaan informasi publik bukan hanya merupakan pengakuan hak asasi manusia secara universal, namun juga pengakuan hak konstitusional setiap warga Negara. Keterbukaan,

partisipasi, dan akuntabilitas badan publik telah menjadi prasyarat dalam mendukung tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk itu, badan publik, baik di pusat maupun daerah, harus dapat membuka diri untuk mempublikasikan informasi terkait kegiatan, program, dan kebijakan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan. Sebaliknya, informasi yang dimiliki masyarakat juga dapat memperkaya berbagai kebijakan pemerintah. Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang selama ini bersifat *top down* menjadi terbuka terbuka untuk komunikasi dua arah, sehingga keterbukaan informasi publik dapat mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi agenda pemerintah saat ini. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang merupakan salah satu tugas penting, terutama bagi pemda dan badan publik lainnya yang mengelola sumber daya, baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Penyediaan informasi seperti yang dijelaskan diatas mengharuskan badan publik untuk menyediakan sebuah sistem informasi dan dokumentasi dengan memanfaatkan sarana baik media elektronik maupun non elektronik. (pasal 7 UU KIP).

6. Open Government dan Open Data

Data terbuka (open data) adalah suatu konsep tentang data yang tersedia secara bebas untuk diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut Open Data Handbook Documentation dari Open

Knowledge Foundation/School of Data adalah konsep data terbuka terutama oleh data terbuka pemerintah (open government data) – 2012 dimana data publik dapat dibuka aksesnya kepada publik, digunakan kembali dalam format yang berbeda tanpa restriksi dan diskriminasi dan syarat minim seperti syarat atribusi.

Open data terkait dengan pemerintahan bertujuan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas serta partisipasi masyarakat. Istilah open data baru populer seiring dengan perkembangan internet dan world wide web. Pencetus gerakan open data adalah pemerintah amerika serikat (data.gov) dan inggris (data.gov.uk).

Penyajian open data yang transparan oleh pemerintah secara tersentraliasi dan bersifat nasional atau lokal akan memberikan manfaat diantaranya :

- a. Data terbuka akan menambah referensi pengetahuan dan bahan riset bagi peneliti, akademisi, pemangku kepentingan dan masyarakat umum.
- b. Aksesibilitas yang meliputi kemudahan akses data dengan menyediakan situs internet untuk pengaksesan data akan memudahkan layanan informasi pemberian data tanoa harus melalui proses tatap muka.
- c. Kebebasan dalam menggunakan data untuk tujuan positif dengan kata lain data menggunakan lisensi yang tidak terlalu terikat
- d. Sebagai bahan advokasi dan pengambilan keputusan

Berkaitan dengan aksesibilitas, Indonesia yang telah memiliki Undang-Undang berkaitan dengan keterbukaan data, yakni UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 sebagaimana dijelaskan pada bagian informasi publik telah memberikan beberapa kategori tentang data yang bisa diakses.

Namun perlu juga diperhatikan bahwa terdapat beberapa pengecualian terhadap data yang dapat diakses, yakni data tentang pertahanan keamanan negara, serta data yang bersifat pribadi. Data terbuka dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen konkret dari kalangan pemerintah dalam upaya peningkatan transparansi, peningkatan partisipasi masyarakat, pemberantasan korupsi dan pemanfaatan teknologi-teknologi baru guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, efektif dan akuntabel, yang disebut birokrasi terbuka atau open government. Tentunya semakin banyak data yang terbuka, semakin besar pula potensi pemanfaatan dari data tersebut oleh masyarakat. Di berbagai negara-negara berkembang, penerapan open data yang telah dirasakan manfaat mulai dari kebijakan pemerintah dalam pengambilan keputusan, partisipasi publik untuk terlibat aktif dalam membuat regulasi, kurikulum pendidikan, tata kelola organisasi bahkan sampai soal bisnis ekonomi.

Di negara Kanada, keterbukaan data menyelamatkan Kanada dari penggelapan pajak senilai 3.2 Miliar dollar Kanada. Di Denmark melalui layanan website seperti folketsting.dk masyarakat diajak untuk

melihat aktivitas parlemen dan anggota parlemen termasuk proses pembuatan undang-undang. Layanan *mapumental* di Inggris dan *mapnificent* di Jerman memungkinkan masyarakat menemukan tempat tinggal dengan mempertimbangkan jarak dari kantor, harga rumah dan kegiatan lingkungan sekitarnya. Di Amerika Serikat aplikasi Nextbus digunakan untuk data transportasi metropolita untuk menyajikan informasi mengenai waktu kedatangan bis di rute pengguna berada. Aplikasi ini bermanfaat bagi masyarakat urban dan *commuter*.

Layanan open data di Amerika Serikat yang juga populer adalah aplikasi *spotcrime.com* yang berguna untuk menganalisa, memetakan statistik kriminal dan daerah yang berpotensi kerawanan. Data ini berguna bagi para pelaku bisnis untuk mendapatkan gambaran wilayah mana yang aman untuk berbisnis.

Kota-kota besar di AS seperti New York, San Fransisco, Chicago, dan Washington, telah memberikan contoh yang inspiratif pada pemanfaatan open data. Di sana telah berdiri beberapa perusahaan seperti OpenGov (*opengoc.com*) dan Govini (*govini.com*) yang membuat open data datu pemerintah kota menjadi lebih mudah diakses, bermanfaat, dan dapat diperbandingkan antar daerah. Dengan data ini penduduk kota dapat memeriksa keuangan pemerintah daerahnya dan membandingkan dengan kota lainnya.

Selain pemerintah, organisasi seperti World Bank juga menyediakan open data (*data.worldbank.org*) yang dapat dimanfaatkan

oleh mahasiswa, peneliti, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Berbagai jenis data tersedia seperti bidang ekonomi, pendidikan, lingkungan, keuangan, cuaca, pertanian, dan lain-lain untuk berbagai negara. Pemanfaatan open data di sektor bisnis bisa dilihat di www.opendata500.com.

Gerakan open data di Indonesia telah menciptakan berbagai inovasi dan inisiatif yang menggaungkan efisiensi dan transparansi. Tidak banyak yang tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir terdapat beberapa kemajuan di bidang pelayanan publik berupa data terbuka. Gerakan ini disebut sebagai *new kid on the block* dalam berbagai gerakan inisiatif publik lainnya sehingga exposure media masih kurang dan dampak yang dirasakan oleh publik masih belum begitu banyak.

Jika melihat perkembangan yang terjadi semenjak Indonesia menjadi host dari *Open Government Partnership* pada tahun 2011. Semenjak itu dibentuklah *Open Government Indonesia* (OGI) untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif dan inovatif.

Tim inti dari OGI unit kerja presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan (UKP-PPP). Ada berbagai inisiatif yang sudah dibuat oleh UKP-PPP diantaranya adalah Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online oleh Rakyat (LAPOR) yang memungkinkan masyarakat mengadukan berbagai pelanggaran hukum dan juga menyampaikan aspirasi ke berbagai kementerian di Indonesia. Selain itu UKP-PPP juga membentuk layanan-layanan publik yang ada di

Indoensia. Misalnya prosedur pembuatan Kartu keluarga, SIM, Passport, lengkap dengan dasar hukum serta kontak dan alamat kantor-kantor tempat pembuatan dokumen tersebut.

Inovasi terakhir yang tidak kalah menarik adalah pembentukan data.id, sebuah portal data yang memuat berbagai data kementerian di Indonesia. Data-data tersebut diolah dalam bentuk yang sudah dapat dibaca oleh mesin. Beberapa data juga sudah dibuat versi Application Programming Interface yang membuat data tersebut dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam format aplikasi atau web dan terjamin interoperabilitasnya. Pembuatan nama dari portal ini pun cukup menarik dan inspiratif yaitu menggunakan data.id dan tidak memilih data.go.id agar data ini menjadi milik semua dan tidak hanya milik pemerintah sehingga dapat menyajikan data dari LSM atau sektor privat. Selain itu untuk menjaga keberlangsungannya jika suatu saat ada pergantian rezim pemerintahan.

7. Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Visi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) adalah “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”. Melalui langkah MP3EI, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi akan menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita yang berkisar antara USD 14.250 – USD 15.500 dengan nilai total

perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0 – 4,5 triliun. Untuk mewujudkannya diperlukan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,4 – 7,5 persen pada periode 2011 – 2014, dan sekitar 8,0 – 9,0 persen pada periode 2015 – 2025. Kebijakan Energi Nasional jangka panjang (2006-2025) dalam Perpres No.5. Tahun 2006 mengarahkan sekitar 2% konsumsi listrik dari PLTS.

Tenaga listrik merupakan salah satu jenis energi yang sangat diperlukan dalam pembangunan. Oleh karena itu dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan sekitar 7%-10% per tahun sampai tahun 2025, konsumsi listrik Indonesia akan meningkat dengan cepat.

Penyediaan tenaga listrik di Indonesia mencapai sekitar 120 GW pada tahun 2025. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik ini sesuai Kebijakan Energi Nasional (Kepres No. 5 Tahun 2006) harus dikembangkan berbagai energi alternatif termasuk energi terbarukan, antara lain panas bumi, mikrohidro, surya, angin, samudera, biomasa dan nuklir, yang ditargetkan mencapai lebih dari 17% dari pangsa energi primer nasional.

Panas bumi, hidro dan mikrohidro (ESDM 2009) mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan yaitu potensi panas bumi maksimum 28,18 Gw, hidro sebesar 75 Gw dan mikrohidro 450 MW.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik pada tahun 2025, maka sumberdaya energi terbarukan yang dapat memberi dukungan

secara signifikan adalah panas bumi, biomasa (melalui sampah, limbah, gasifikasi dan BBN) serta surya melalui PLTS. Tenaga angin sesuai dengan kondisi Indonesia sangat terbatas, sedangkan tenaga kelautan secara teknis dan ekonomis sulit dikembangkan secara besar-besaran.

Tenaga surya yang telah dimanfaatkan saat ini adalah salah satu sumber yang paling menjanjikan energi untuk abad ke-21 (Adel El Gammal, 2010), mengingat :

- a. Bersih; sistem tenaga surya menghasilkan listrik dengan nol emisi gas CO₂ atau polutan lainnya yang berhubungan dengan pemanasan global dan hujan asam.
- b. Terbarukan; sistem tenaga surya dapat mengkonversi cahaya matahari alami ke dalam penyediaan energi yang tidak terbatas.
- c. Berlimpah; jumlah sinar matahari dalam setiap jam mengandung energi cahaya setara dengan konsumsi energi total dunia selama satu tahun.

Sifat yang mendasar dari PLTS ialah pembangkitan listrik dilaksanakan hanya pada siang hari. Mengingat sebagian besar wilayah di Indonesia mempunyai beban puncak pada malamhari, maka pemanfaatan PLTS untuk penggunaan malam hari harus memiliki sarana penyimpanan daya.

Unit atau Modul PLTS terdiri dari panel Solar cell, modul pengatur daya, baterai/accu, sarana pengguna seperti lampu, TV, pompa air dan lain lain. Pemanfaatan PLTS adalah dibagi dalam tiga

sistem, sistem mandiri (stand alone), sistem terpusat (centralized) dan sistem terhubung jaringan (grid connected/on-grid).

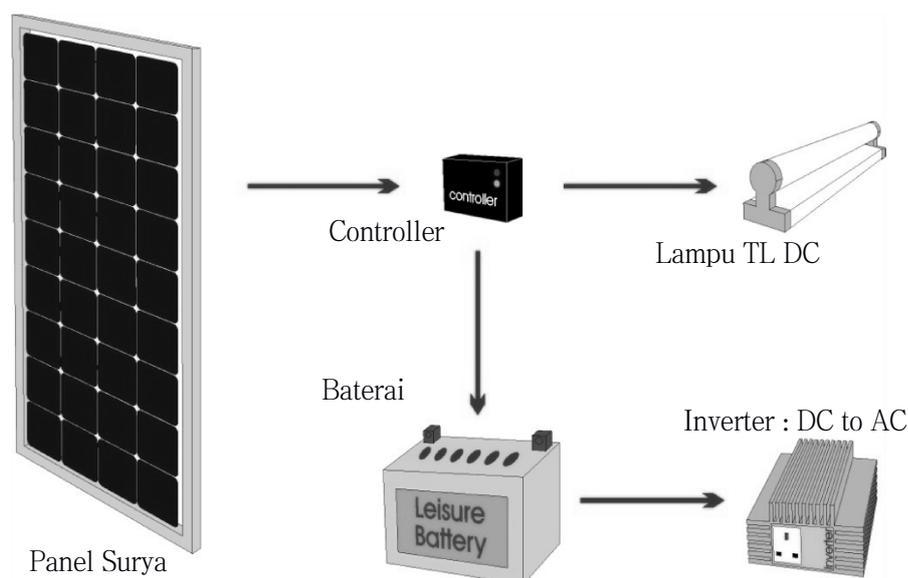
Sistem mandiri terdiri dari dua kategori, yaitu PLTS dengan kapasitas kecil disebut Solar Home System dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan rumah-tangga, puskesmas, kantor kelurahan, serta telekomunikasi yang berdiri sendiri dengan kapasitas kecil (50 Wp) maupun sedang (250 Wp). PLTS mandiri dimanfaatkan pada wilayah yang jarak antara rumah yang satu dan rumah yang lain relatif berjauhan.

PLTS terpusat merupakan pengembangan PLTS` mandiri yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan energi pada suatu wilayah untuk berbagai keperluan, seperti pompa air, penerangan, es untuk para nelayan dan lain-lain. Sistem PLTS terpusat dimanfaatkan pada wilayah belum terlistriki dengan beban terpusat dimana jarak antara rumah yang satu dengan yang lain relatif berdekatan. Penerapan PLTS terpusat pada wilayah dengan perumahan yang berjauhan akan mengakibatkan kehilangan daya yang besar.

Sistem Hibrida dikembangkan dengan integrasi PLTS dengan PLTD maupun PLT Bayu untuk meningkatkan kinerja sistem kelistrikan PLTD. Penggunaan PLTS dapat menggantikan penggunaan PLTD pada beban dasar di siang hari) sehingga mengurangi pemakaian BBM dan dapat menurunkan biaya pembangkitan listrik.

Potensi PLTS Indonesia sangat besar, di atas 1 TW. Indonesia adalah negara dengan serapan tenaga surya terbesar di ASEAN, karena matahari ada setiap hari sepanjang tahun. Intensitas radiasi rata-rata 4,8 kWh/m²/hari, NTB dan Papua tertinggi 5,7 kWh/m²/hari dan Bogor terendah 2,56 kWh/m²/hari. Intensitas radiasi ini sangat tergantung dengan cuaca dan awan. Kapasitas terpasang relatif masih rendah yaitu 12.1 MW, tersebar diseluruh wilayah di Indonesia.

Pulau Sembilan yang terletak di sebelah timur Kabupaten Sinjai selalu mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk membangkitkan listrik. Kondisi perumahan yang berkumpul di bagian pinggir pulau sehingga mudah untuk menyalurkan listrik dengan transmisi kabel jika akan memasang PLTS terpusat.



Gambar 2.2

Skema Pembangkitan Listrik Dengan Sell Surya

Keberhasilan pengoperasian PLTS bukan hanya dengan terpasangnya unit PLTS tetapi pada pengoperasian dan perawatan. Seperti accu akan memerlukan penambahan air demineralized atau air suling. Pada pengoperasi SHS sering dijumpai kelupaan penambahan dan penambahan air yang tidak tepat menyebabkan accu rusak dan sistem tidak beroperasi. (Boedoyo : 2012).

B. Landasan Teori

1. Teori New Media

Peluncuran buku *The Second Media Age* oleh Mark Poster dinilai sebagai penanda mulainya periode baru dimana teknologi interaktif dan komunikasi jaringan, khususnya dunia maya akan mengubah masyarakat. (Littlejohn dan Foss, 2014:413). Media Baru secara sederhana diartikan sebagai media interaktif yang menggunakan perangkat dasar komputer. Media Baru dalam cakupan yang cukup luas dijelaskan bahwa media baru yang muncul akibat inovasi teknologi dalam bidang media meliputi televisi kabel, satellites, teknologi optic fiber dan komputer. (Croteau dalam Kurnia, 2005: 291).

Munculnya media baru yang membawa ke konsep masyarakat informasi sebagai masyarakat yang *'depent upon complex electronic information and communication networks and which allocate a major portion of their resources to information and communication activities'*. (McQuail dalam Kurnia, 2005 : 291).

Teori new media termasuk pada tradisi sosiokultural yang memfokuskan pada bentuk-bentuk interaksi antar manusia daripada karakteristik individu. Pada tradisi ini media dianggap sebagai bagian dari konteks budaya. (littlejohn dan Foss, 2014 : 65).

Menurut McLuhan, kehadiran New Media dapat membuat sebuah proses komunikasi menjadi global, sehingga menyebabkan mengapa dunia saat ini disebut dengan Global Village. McLuhan mengatakan bahwa dunia akan menjadi satu desa global (Global Village) dimana produk produk yang ada akan menjadi cita rasa semua orang. Global Village menjelaskan bahwa tidak ada lagi batas waktu dan tempat yang jelas. Informasi dapat berpindah dari satu tempat ke belahan dunia lain dalam waktu yang sangat singkat dengan menggunakan teknologi internet.

Global Village adalah konsep mengenai perkembangan teknologi komunikasi di mana dunia dianalogikan menjadi sebuah desa yang sangat besar. McLuhan memperkenalkan konsep ini pada awal tahun 60-an dalam bukunya yang berjudul *Understanding Media: Extension of A Man*. Konsep ini berangkat dari pemikiran McLuhan bahwa suatu saat nanti informasi akan sangat terbuka dan dapat diakses oleh semua orang.

Manuel Castells mengemukakan bahwa bukanlah sebuah 'desa' yang dikatakan seragam, melainkan masyarakat dalam jaringan global yang saling terhubung lewat *New Media, Network society*.

Menurutnya, media tidak lagi merupakan Media Massa melainkan menjadi media jaringan, atau jaringan interaktif multimedia, yang akan menjadikan komunikasi dunia suatu jaring-jaring raksasa, suatu dunia yang saling terhubung.

Diibaratkan sebagai berikut: manusia sebagai laba-laba yang membangun jaring-jaringnya, dimana teknologi informasi dalam berbagai fitur dan bentuk sebagai new media elektronik interaktif yang hidup di tengah jaringan tersebut. Jaringan-jaring tersebut menjadi sarang dan alat untuk mencari makan, dimana laba-laba dan jaring adalah bentuk yang tak terpisahkan.

Teori media baru merupakan sebuah teori yang dikembangkan oleh Pierre Levy, yang mengemukakan bahwa media baru merupakan teori yang membahas mengenai perkembangan media. Pierre Levy memandang World Wide Web (WWW) sebagai sebuah lingkungan informasi yang terbuka, fleksibel dan dinamis, yang memungkinkan manusia mengembangkan orientasi pengetahuan yang baru dan juga terlibat dalam dunia demokratis tentang pembagian mutual dan pemberian kuasa yang lebih interaktif dan berdasarkan pada masyarakat (<http://en.wikipedia.org>).

New Media atau media online didefinisikan sebagai produk dari komunikasi yang termediasi teknologi yang terdapat bersama dengan komputer digital (Creeber dan Martin, 2009). Definisi lain media online adalah media yang di dalamnya terdiri dari gabungan berbagai elemen.

Itu artinya terdapat konvergensi media di dalamnya, dimana beberapa media dijadikan satu (Lievrouw, 2011). New Media merupakan media yang menggunakan internet, media online berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, berpotensi interaktif dan dapat berfungsi secara privat maupun secara public (Mondry, 2008: 13).

Teori New media adalah sebuah konsep pemahaman dari perkembangan Zaman mengenai Teknologi dan Sains, dari semua yang bersifat manual menjadi otomatis ,dan dari semua yang bersifat rumit menjadi ringkas. Digital adalah sebuah metode yang Complex, dan fleksibel yang membuatnya menjadi sesuatu yang pokok dalam kehidupan manusia. Teori Digital selalu berhubungan dengan Media, mengapa? karena Media adalah sesuatu yang terus berkembang. Mungkin banyak diantara kita masih belum faham yang namanya New Media /Media baru. New media / media baru adalah media yang terbentuk dari interaksi manusia dengan teknologi.

Media menurut Assosiasi Teknologi dan Komunikasi (Association of Education and Communication Technology/ AECT) di Amerika memberi batasan yaitu: Media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan/ informasi.

New Media adalah media yang sedang berkembang saat ini dalam konteks teknologi informasi dan komunikasi maupun komunikasi. Media Modern menjadi Payung Kehidupan yang menghubungkan

Manusia dengan Manusia, dan Manusia dengan Teknologi pada abad ini.

New media merupakan sebuah terminologi untuk menjelaskan konvergensi antara teknologi digital yang terkomputerisasi serta terhubung ke dalam jaringan. contohnya: internet, program televisi, film, majalah, buku dll. Internet sendiri telah membuat revolusi dunia komputer dan dunia komunikasi yang tidak pernah diduga sebelumnya. Penemuan telegram, telepon, radio, dan komputer merupakan rangkaian kerja ilmiah yang menuntun menuju terciptanya Internet yang lebih terintegrasi dan lebih berkemampuan dari pada alat-alat tersebut. Internet memiliki kemampuan penyiaran ke seluruh dunia, memiliki mekanisme diseminasi informasi, dan sebagai media untuk berkolaborasi dan berinteraksi antara individu dengan komputernya tanpa dibatasi oleh kondisi geografis. Dalam hal ini, internet mempunyai banyak kegunaan yang menguntungkan dalam berbagai bidang (bisnis, akademis, pemerintahan, organisasi, dsb) antara lain :

- a. Informasi yang didapatkan lebih cepat dan murah dengan menggunakan berbagai aplikasi antara lain : email, NewsGroup, www, FTP.
- b. Mengurangi biaya kertas dan biaya distribusi, contoh : koran, majalah dan brosur.
- c. Sebagai media promosi, contoh : pengenalan dan pemesanan produk.

- d. Komunikasi interaktif, meliputi : email, dukungan pelanggan dengan www, video, conferencing, internet relay chat, internet phone.
- e. Sebagai alat untuk research dan development.

Ini dapat disimpulkan bahwa resolusi dari internet menciptakan image baru, yaitu sebuah new media yang kebanyakan orang sudah menggunakannya pada saat ini. Ini merupakan sebuah implementasi dari perluasan ikon yang bersumber pada internet. Contoh new media yang telah digunakan oleh masyarakat antara lain : mobile (handphone), komputer, tv online, radio online, mp3 online, foto gallery, memory, slide show serta aplikasi-aplikasi dalam internet sebagai ikon new media, misalnya youtube, myspace, facebook, twitter, digg, google, yahoo,dll.

Komponen dari new media terdiri dari 3 unsur yaitu pembuat, penyalur dan pemakai dari new media itu sendiri. dan adapun karakteristik dari New Media antara lain Komponen dari new media terdiri dari 3 unsur yaitu pembuat, penyalur dan pemakai dari new media itu sendiri. dan adapun karakteristik dari New Media antara lain :

- a. Digital, dimaksudkan bagaimana bentuk data digital ini dapat menjadi lebih baik penggunaannya dari data analog dalam segi kecepatan dan ke-real-annya. Dan sudah jelas bahwa new media yang berbasis digital hanya dapat dilakukan dengan media komputer. Meski saat ini new media juga sudah dapat diakses dengan teknologi mobile seperti smartphone.

- b. Interaktifitas, dapat menghemat waktu, secara langsung dapat kita kendalikan dan komunikasi dua arah dapat terjadi hanya dengan media komputer saja. Pengaturan informasi yang kreatif dari karakter inilah yang juga menjadi pilihan pengguna dalam teknologi media ini. Meski sebenarnya interaksi tersebut terjadi antara manusia dan komputer.
- c. Hypertextual, adalah teks yang dapat mengizinkan kita mengakses teks-teks lain. Dengan hanya meng-klik satu teks saja yang sudah terdapat link didalamnya maka kita dapat terhubung dengan halaman lain dengan isi teks yang berbeda.
- d. Dispersal, maksudnya adalah menyebar, dimana produksi, distribusi dan konsumsi tidak terpusat. Karena setiap pengguna internet dapat sesuka hati menjadi produsen, distributor atau hanya sekedar konsumen (personal freedom). Inilah yang dinilai new media merupakan media yang lebih bersifat pribadi (individually). Hingga dapat menjadi hal biasa dalam kehidupan sehari-hari penggunaannya.
- e. Virtuality, karakter unik yang dimiliki new media. Ini adalah persepsi kita terhadap objek-objek immaterial. Karena new media juga memiliki unsur presence atau kehadiran meski tidak secara fisik, sering kita menyebutnya dunia maya. Karakter ini juga yang mendorong terbentuknya salah satu budaya baru yakni budaya virtual.

2. Teori Seeking Information (Pencarian Informasi)

Penelitian menggunakan teori pencarian informasi. Perilaku pencari informasi didorong oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi. Teori information seeking, Donohew dan Tipton (1973), yang menjelaskan tentang pencarian, penghindaran, dan memproses informasi, disebut memiliki akar dari pemikiran psikologi sosial tentang kesesuaian sikap. Salah satu asumsi utamanya adalah bahwa orang cenderung untuk menghindari informasi yang tidak sesuai dengan image of reality-nya karena terasa membahayakan.

Beberapa konsep utama dari teori ini antara lain adalah image atau image of reality. Pertama-tama konsep image ini mengacu pada pengalaman yang diperoleh sepanjang hidup seseorang dan terdiri dari berbagai tujuan, keyakinan, dan pengetahuan yang telah diperolehnya. Bagian kedua dari image terdiri dari konsep diri seseorang, termasuk evaluasinya terhadap kemampuan dirinya dalam mengatasi berbagai situasi. Ketiga, *image of reality* terdiri dari suatu perangkat penggunaan informasi yang mengatur perilaku seseorang dalam mencari dan memproses informasi.

Teori ini kemudian dikembangkan Dervin dalam Thomas (2004: 65) yang dikutip oleh Mardiana (2015) menyatakan "*information seeking as sense-making*". Dalam hal ini, penulis mencoba menelusur istilah kata "sense-making" dan menemukan teori berikut :

Sense-Making theory menurut Dervin dalam Wilson (1999) adalah “... *a set of assumptions, a theoretic perspective, a methodological approach, a set of research method, and a practice, ‘designed to cope with information perceived as’, ... a human tool designed for making sense of a reality assumed*”.

Dalam pandangan Dervin yang ditulis oleh Thomas (2004: 65) yang dikutip oleh Mardina (2015) “*what people require when they find themselves stuck in an information gap is personalized information based on their interests, their views of the problem, and whatever barriers they expect to encounter*”. Artinya : “Apa yang orang-orang perlukan ketika mereka menemukan diri mereka ditikam dalam sebuah pemisah informasi adalah menyelaraskan informasi berdasar pada minat mereka, pandangan mereka terhadap masalah, dan terhadap apapun rintangan-rintangan yang mereka harapkan bisa dihadapi”.

Dervin (1992) merumuskan model “sense-making” sebagai empat elemen dasar yaitu : sebuah situasi dalam rentang ruang dan waktu yang menjadi konteks bagi kemunculan masalah-masalah informasi, sebuah kesenjangan kognitif yang merupakan indikasi adanya perbedaan antara situasi kontekstual dengan situasi yang diinginkan oleh seseorang, suatu hasil (outcome), dan sebuah jembatan kognisi yang mengurangi kesenjangan antara situasi dan hasil. Dalam modelnya, Dervin menggambarkan seorang pencari informasi sebagai orang yang bergerak melalui sebuah situasi yang

telah membuatnya merasakan ada kekurangan atau kesenjangan dalam struktur kognisinya.

Jadi yang dimaksud sebagai pencarian informasi adalah upaya seseorang untuk mengisi gap (kekosongan atau jarak) antara ketidaktahuan dengan kenyataan yang terjadi jadi seseorang tersebut akan berusaha untuk memiliki pengetahuan tentang sesuatu fakta yang sebelumnya belum diketahuinya.

3. Teori Uses and Gratifications

Teori Uses and Gratifications merupakan perpanjangan teori kebutuhan dan motivasi yang dikembangkan Abraham Maslow (1970) yang menyatakan bahwa manusia secara aktif mencari pemuasan kebutuhannya mulai dari kebutuhan fisik sampai yang bersifat abstrak seperti aktualisasi diri. (Bahfiarti : 2012).

Teori uses and gratifications (U&G) awalnya dikembangkan oleh Kazt dan Gurevic dari "Mass Media Uses and Gratification Model". Berbeda dengan teori efek media lainnya yang menitikberatkan pada "apa yang dilakukan media terhadap khalayak" dan menganggap pengguna media bersifat homogen. Teori U&G lebih memberikan perhatian pada "apa yang dilakukan khalayak terhadap media" sebagai bentuk perilaku individu sebagai khalayak aktif, dapat mengontrol konsumsi media, maupun memberikan laporan yang akurat mengenai pemuasan kebutuhan yang mereka cari dan dapatkan dari media.

Beberapa asumsi U&G yang dikemukakan oleh Katz, Blumer dan Gurevitch (Bahfiarti :2012) adalah :

1. Khalayak adalah aktif dan menggunakan media adalah bertujuan
2. Inisiatif atas keterlibatan pemuasan kebutuhan terhadap pemilihan media tertentu berada di tangan khalayak
3. Media dan sumber-sumber lain bersama-sama memenuhi kebutuhan khalayak
4. Orang-orang yang mempunyai cukup kesadaran atas penggunaan media, ketertarikan, dan motif.
5. Penilaian terhadap isi media hanya dapat dilakukan oleh khalayak itu sendiri.

Palmgreen (1984) U&G sebagai model kepuasan terpadu (integrative gratification model) adalah kepercayaan atau harapan terhadap media dan alternatif-alternatif non media yang semuanya dapat mempengaruhi kepuasan yang dicari, pilihan media dan kepuasan diperoleh. Levy dan Windahl (1985) ada tiga dimensi otentasi khalayak (selektivitas, keterlibatan, dan utilitas) untuk membantu memperjelas kebutuhan audiens terhadap media massa, penggunaan media massa terhadap khalayak dan kepuasan diterima audiens dari media massa. (Charles R Berger, Michael E Roffol dan Davis R : 372).

Kepuasan khalayak setelah menggunakan media kemudian harus dapat diukur. Mowen dan Minor (2002:116) mendefinisikan kepuasan konsumen (konsumer satisfaction) adalah keseluruhan sikap

yang ditunjukkan konsumen atas barang dan jasa, setelah mereka memperoleh dan menggunakannya. Gratifikasi yang dapat diperoleh khalayak dari penggunaan media dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah motivasi dasar, situasi sosial, dan latar belakang individu seperti pengalaman, kepentingan dan pendidikan.

C. Penelitian Yang Relevan

Penelitian ini merupakan suatu studi penggunaan media komunikasi khususnya yang menyangkut tentang pemanfaatan media online yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang menciptakan media baru. Tema yang dipilih adalah tentang penggunaan media online dalam sebuah tender pengadaan dalam mendukung keterbukaan informasi. Media yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan tender dan informasi lain yang menyertainya.

Signifikansi teoritis yang berusaha diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan justifikasi terhadap kerja-kerja unit layanan pengadaan di kabupaten sinjai yang berusaha memberikan pelayanan terbaik pada pelaksanaan tender dan juga menganalisis serta memberikan gambaran fakta-fakta pada penggunaan teknologi informasi beserta dampak penggunaannya.

Penelitian tentang keterbukaan informasi dalam kaitannya dengan open government dan open data pada LPSE masih kurang diteliti oleh mahasiswa.

Berikut ini beberapa karya penelitian yang peneliti anggap memiliki kaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi, open government, open data, dan tender online :

1. *Open Data dan Partisipasi Publik (Studi Pemanfaatan Open Data KPU dalam Kasus Pemilu Legislatif 2014-2019 di Sulawesi Selatan)*, Mardiana, 2015 Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.

Dalam tesis ini disebutkan beragam jenis layanan open data yang disiapkan oleh KPU dan kemudian menjelaskan bagaimana semua yang bisa memanfaatkan data pada layanan tersebut dan juga berpartisipasi dalam mengontrol proses penyelenggaraan pemilu.

Disebutkan pula bahwa dalam pengoperasian layanan open data di Sulawesi Selatan belum membumi karena hanya segelintir pihak yang berkepentingan dengan pemilu legislatif seperti pengawas pemilu, penyelenggara pemilu, NGO yang konsen dengan pemilu dan juga peserta pemilu itu sendiri.

Namun dari segi penyediaan layanan, partisipasi publik terlihat nyata yakni pendidikan politik, penyiaran media, pengawasan dan pengontrolan di setiap tahapan dan pengambilan keputusan.

2. *Keterbukaan Informasi Publik Melalui Media Online dalam Mewujudkan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Barru, Asri Asik, 2015, Program Pasca Sarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar.*

Tesis ini ditulis oleh Asri Asik mahasiswa PPS Unhas Prodi Ilmu Komunikasi yang menjelaskan tentang implementasi keterbukaan informasi pada pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Barru yang memanfaatkan media online. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah melihat transparansi dengan pemanfaatan media online pada proses e-procurement yang berlangsung.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan secara purposive sampling sebanyak 10 orang. Data dianalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penerapan sistem elektronika-Procurement pada Pemerintah Kabupaten Barru merupakan suatu bagian upaya untuk mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih efisien dan transparan.

Manfaat pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui media online sangat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat karena dengan penerapan e-procurement proses tatap muka antara panitia dan rekanan semakin berkurang, sehingga rekanan tidak perlu datang berkali-kali, karena semua

informasi pengadaan barang/jasa bisa dilihat dan transaksi melalui internet.

3. *Open Government and E-Government: Democratic Challenges from a Public Value Perspective*, Teresa M. Harrison, 2011, Center for Technology in Government U/Albany, Dept. of Communication & Center for Technology in Government University at Albany, SUNY Albany, NY 12222

Jurnal ini memaparkan bagaimana menyatukan teknologi dengan kegiatan administrasi pada pemerintahan Amerika dengan open government sehingga pemerintah dan warga menjadi lebih transparan, partisipatif, dan kolaboratif dan mewujudkan negara yang lebih demokratis.

Pada pendahuluannya menjelaskan tentang pemerintahan di Amerika yang dimulai dari Presiden Barak Obama dengan sebuah memorandum tentang transparansi dan open government dan menginstruksikan pelaksanaannya. Bahkan saat kampanye presiden pun telah menggunakan internet.

Teresa juga memaparkan tentang Teknologi, Demokrasi dan Pemerintahan. Dimulai dari bagaimana teknologi semakin berkembang sejak abad 21 dan kemudian memberi pengaruh pada demokrasi dan pemerintahan. Mulai muncul e-government yang kemudian semakin menuntut pemerintah untuk bisa memberikan layanan yang cepat dan terbaik pada masyarakat.

Penelitian ini menurut Teresa masih dalam konstruksi dan butuh pengujian secara empiris, namun telah menegaskan bahwa

open government ini sangat penting karena pemimpin telah menyatakan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warga agar tercipta pemerintahan yang transparan, demokrasi dan dengan partisipasi dari publik.

4. *Resistensi Reformasi Procurement : Studi Pengadopsian LPSE Kementerian Kehutanan, Fadhilah Fajriah, 2014, Program Pasca Sarjana Administrasi Publik, UGM, Yogyakarta.*

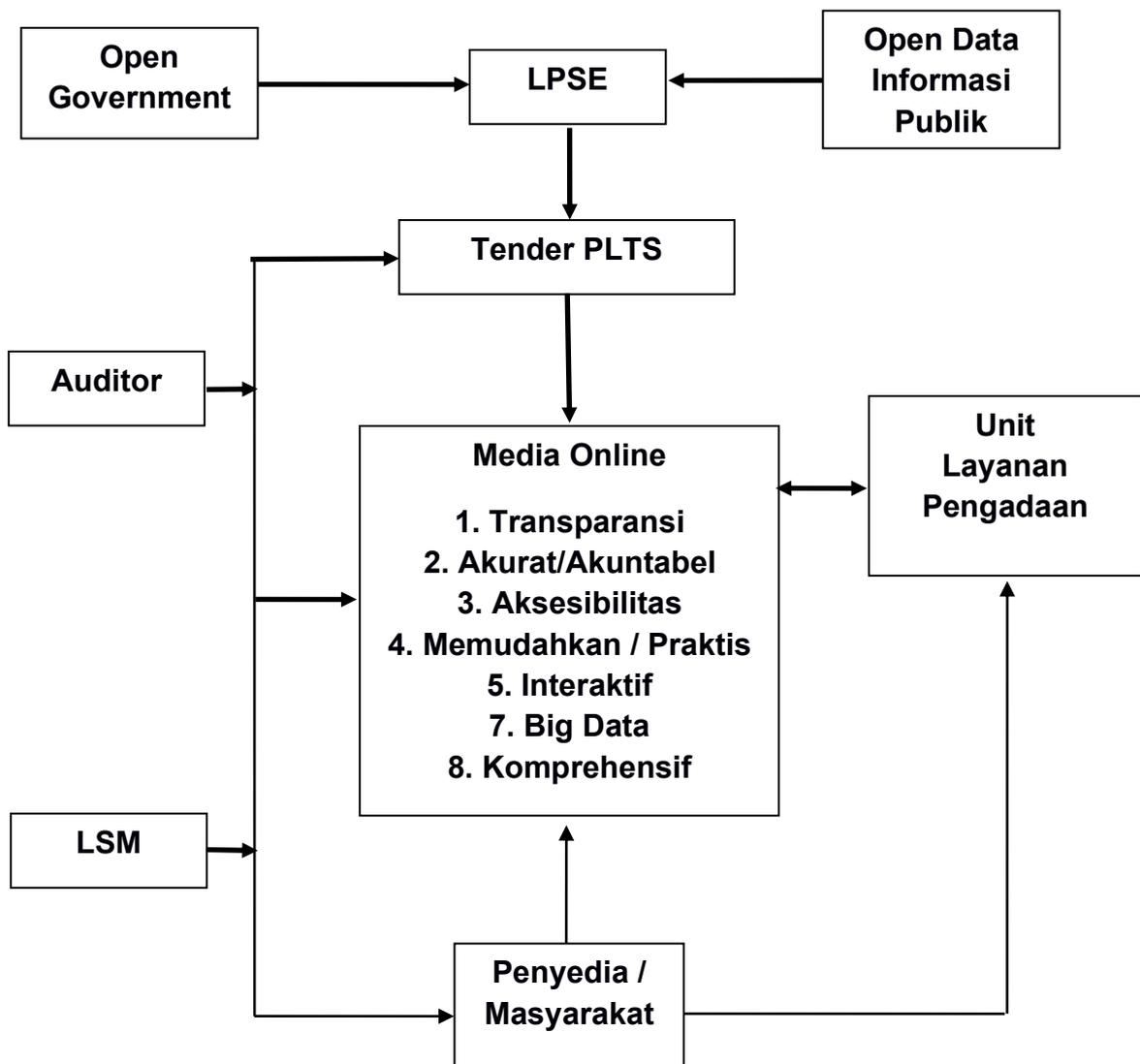
Tesis ini membahas tentang kegiatan pemerintah yang sering mendapat sorotan karena sarat korupsi adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah. Salah satu instrumen untuk mengatasi persoalan tersebut adalah dengan mengadopsi pengadaan secara elektronik (e-procurement).

Pengadopsian e-procurement sebagai wujud reformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah bukanlah tanpa resistensi dari birokrasi itu sendiri. Resistensi tersebut dapat berasal faktor organisasi, faktor grup dan individu. Faktor organisasi dapat berwujud inersia struktural, ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang telah mapan (konflik dan kekuasaan) dan ancaman terhadap sumber daya.

Faktor kelompok yang menjadi penyebab resistensi adalah work group inersia dan ancaman terhadap alokasi sumber daya. Sedangkan faktor individu berasal dari ancaman terhadap keahlian dan ancaman terhadap alokasi sumberdaya.

D. Kerangka Pikir

Pada penelitian ini, melalui kajian konsep dan landasan teori, peneliti berusaha menggambarkan tentang keterbukaan informasi publik melalui gerakan open government dan open data dengan contoh lelang online PLTS melalui unit LPSE Kabupaten Sinjai dan penggunaan layanan tersebut oleh Unit Layanan Pengadaan, para penyedia barang/jasa dan masyarakat.



Gambar 2.3. Kerangka Pikir Penelitian

LPSE menyediakan layanan untuk pelaksanaan tender PLTS melalui media online sehingga Unit Layanan Pengadaan akan mengelola proses pengadaanya melalui media online tersebut dari awal hingga akhir, pengusaha dan masyarakat bisa melihat pengumuman pengadaan melalui media online dan berhak untuk ikut jika memenuhi kriteria dan auditor serta LSM bisa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tender tersebut.

E. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

1. LPSE adalah unit kerja yang dibentuk di berbagai instansi dan pemerintah daerah untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik. Seluruh ULP dan Panitia Pengadaan dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya
2. Tender PLTS adalah proses pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya
3. Media Online adalah media yang disediakan oleh LPSE untuk memfasilitasi semua hal yang berhubungan dengan proses tender mulai dari perencanaan kegiatan hingga pengumuman pemenang.
4. Unit layanan pengadaan (ULP) adalah unit organisasi yang menjadi bagian dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, institusi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang atau jasa yang bersifat

permanen. Unit ini dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

5. Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. Auditor yang dimaksud disini adalah BPK dan BPKP.
6. Lembaga swadaya masyarakat (disingkat LSM) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. LSM yang berada di daerah banyak lebih berupa organisasi oposisi memilih untuk menjadi penyeimbang dari kebijakan pemerintah untuk mengawal proyek-proyek ke masyarakat agar berjalan sesuai dengan prosedur dan tujuannya.
7. Pengusaha (penyedia) / Masyarakat adalah masyarakat secara keseluruhan yang punya peluang sama untuk ikut dalam tender-tender yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB III

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini didasar atas pandangan dan asumsi bahwa proses pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan media online di Kabupaten Sinjai telah berjalan dengan baik dan media tersebut telah dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Maka orientasi teoritik penelitian ini menggunakan orientasi fenomenologi (sudarwan, 2002) yaitu Mendeskripsikan penggunaan media online dalam pelaksanaan tender PLTS di Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai. Karena itu yang dipentingkan adalah prosesnya.

B. Rancangan Penelitian

Rancangan (desain) yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan mengangkat tema penggunaan media online dalam tender PLTS di Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menjelaskan penggunaan teknologi informasi dalam mendukung open government dan open data informasi publik.

C. Data dan Sumber Data

1. Data Primer yang berupa data yang dikumpulkan dari informan yang diwawancarai dengan teknik purposive. Teknik purposive adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan oleh peneliti, atau dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.
2. Data Sekunder yang berupa data dari dokumen-dokumen dan akses langsung ke media online yang tersedia. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, surat-surat penting, surat keputusan, peraturan daerah, peraturan bupati, dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. (Sugiyono : 2011). Bogdan menyatakan "*In most tradition of qualitative research, the phrase personal document is used broadly to refer to any first person narrative produced by an individual which describes his or her own actions, experience and belief*". Sedangkan akses ke media online adalah langsung mengakses semua media yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan tender online untuk melihat data yang tersedia.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian menurut Sugiyono - 2011 adalah yang memenuhi syarat kriteria berikut ini :

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayati.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang punya waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil 'kemasannya' sendiri.

Ada 2 kategori informan yaitu (1) penyelenggara media online dan (2) pengguna media online. Kedua kategori dibagi lagi menjadi 7 kelompok informan yaitu, Auditor, Peyedia, LSM, ULP, PPK, Penyelenggara Media Sinjai dan Masyarakat. Penelitian ini menguji manfaat serta kegunaan media dan kesiapan teknologi yang digunakan. Selain itu juga untuk melihat perilaku para informan ini mencari informasi.

1. Informan Penyelenggara Media Online

Penyelenggara media online di Kabupaten Sinjai berada dibawah koordinasi dari Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisata (Diskominfobudpar). Dinas ini punya tugas pokok

untuk membantu Bupati dalam bidang Teknologi Informasi serta Kebudayaan dan Kepariwisata.

Peneliti memilih informan dari Muh. Yassin Amin sebagai Kepala Dinas yang akan memberikan secara umum tentang media online dan lelang di Sinjai, Supardi yang menjabat Kepala Bidang yang membawahi langsung tim website dan LPSE Sinjai, Ihsan yang menjadi Admin LPSE Sinjai yang mengetahui sistem SPSE secara utuh, serta Haryanti Arief sebagai koordinator tim website yang menangani website Sinjai.

2. Informan Auditor

Andi Muallim adalah salah satu auditor pada Inspektorat Sinjai yang diberikan tugas oleh Kepala Inspektorat untuk diwawancara oleh peneliti. Peneliti juga sudah mengirim surat ke BPK dan BPKP tapi BPK belum memberikan jawaban hingga penulisan ini sedangkan BPKP sekarang lebih banyak turun memberi bimbingan teknis dan sudah tidak mengaudit daerah.

3. Informan LSM

Peneliti memilih Kopel karena menjadi satu-satunya LSM independen yang sangat perhatian dengan masalah pengadaan barang dan jasa pemerintah serta menjadi pengguna informasi publik pemerintah. Musaddaq mewakili Kopel Sinjai untuk memberikan jawaban wawancara.

Banyak LSM lain yang sering menjadi pemerhati pengadaan pemerintah tapi menurut pengamatan peneliti tidak layak untuk dijadikan narasumber karena mereka kadang bertindak juga sebagai penyedia barang dan jasa di waktu yang lain.

4. Informan Penyedia

Penyedia yang terpilih adalah yang menjadi pemenang lelang PLTS tapi terkendala dengan kontak yang harus dihubungi sehingga peneliti memilih Andi Toto direktur CV. Hasta Teknik sebagai salah satu penyedia yang paling sering mengikuti lelang secara elektronik baik di Sinjai maupun di daerah lain. Selain itu peneliti juga bertemu dengan bapak R. Padrial sebagai pelaksana teknis dari PT. Inti yang membangun PLTS 2016 di pulau Burung Loe.

5. Informan ULP

ULP atau Unit Layanan Pengadaan yang bertindak sebagai panitia pengadaan. Peneliti mewawancarai semua anggota yang masuk dalam kelompok kerja (pokja) pengadaan PLTS Sinjai. A. Arifuddin sebagai Kepala ULP yang sekaligus anggota Pokja PLTS. A. Syarifuddin, anggota. Rafiuddin, anggota. Hertasning, anggota. Suharman, anggota.

6. Informan PPK

Peneliti memilih PPK PLTS sebagai pejabat yang membuat kontrak pelaksanaan proyek. Muhammad Ali, pegawai Dinas ESDM Sinjai.

7. Masyarakat

Wawancara dengan masyarakat di sekitar PLTS. Peneliti memilih kepala dusun (kadus) kanalo 1, kadus kanalo 2, kadus batanglampe 1, kadus kodingare, wakil kadus liang-liang, kepala desa pulau persatuan dan desa padaelo. Para Kepala Desa dan Kepala Dusun ini memberi gambaran tentang masyarakat disekitar mereka terutama tentang hasil dari proyek PLTS yang melayani kebutuhan listrik pulau.

Peneliti juga bertemu langsung dengan camat Pulau Sembilan untuk mendapatkan penjelasan tentang kondisi listrik dan kecamatan secara umum.

Informan tersebut di atas berjumlah 23 orang yang lebih jelas kita lihat pada tabel berikut :

No.	Kategori	Informan
1.	Penyelenggara Media Online Sinjai	- Yassin Amin, Kepala Dinas Kominfo Sinjai - Supardi, Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Sinjai - Ihsan, Admin LPSE Sinjai - Supardi, Ketua LPSE Sinjai - Haryanti Arif, Koordinator Tim Website Sinjai
2.	Auditor	- Andi Muallim, Inspektorat Sinjai
3.	Pokja ULP yang menjalankan lelang PLTS	- Arifuddin, Ketua ULP Sinjai - Rafiuddin Mas'udy - Hertasning - Syarifuddin - Suharman
4.	LSM yang fokus pada lelang pemerintah	- Musaddaq, KOPEL

5.	Pejabat Pembuat Komitmen - PPK PLTS	- Muhammad Ali
6.	Penyedia yang memanfaatkan LPSE	- Andi Toto, CV. Hasta Teknik - R. Padrial, PT. Inti
7.	Masyarakat yang berada disekitar PLTS	- Camat Pulau Sembilan - Kepala Desa Persatuan - Kepala Desa Padaelo - Kepala Dusun Kanalo 1 - Kepala Dusun Kanalo 2 - Kepala Dusun Batanglampe 1 - Kepala Dusun Kodingare - Wakil Kepala Dusun Pulau Leang-leang

Tabel 3.1. Daftar dan Kategori Informan

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan Triangulasi yaitu :

1. Observasi langsung ke media online yang menjadi obyek penelitian, observasi dilakukan dengan cara observasi terus terang atau tersamar. Peneliti memperkenalkan diri pada tim LPSE dan pihak pengguna media online bahwa sedang melakukan penelitian untuk kemudian melakukan wawancara.
2. Wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang menggunakan media tersebut dan dokumentasi yang tersedia. Chaterin Marshall, Gretchen B. Rossman menyatakan bahwa *“the fundamental methods relied on by qualitative researchers for gathering information are, participation in*

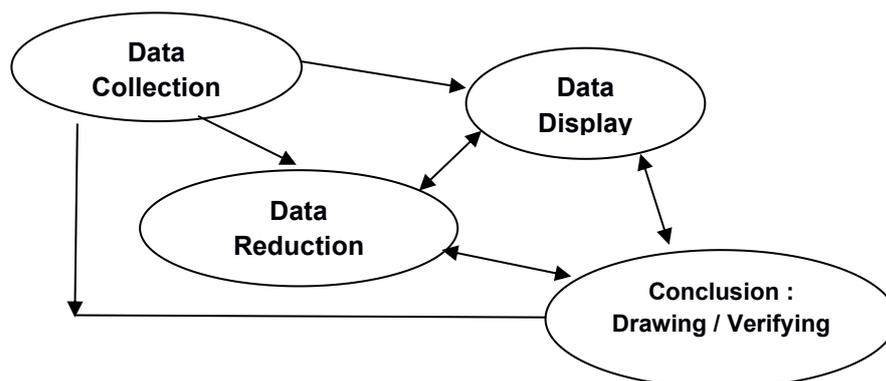
the setting, direct observation, in-depth interviewing, document review.”

(Sugiyono : 2011).

3. Peneliti juga mengakses semua data dari web yang tersedia, mengambil gambar kegiatan, membuat surat permohonan agar diberikan akses ke dokumen-dokumen yang bisa membantu dalam penelitian ini. Semua informasi dari studi dokumentasi ini termasuk data sekunder yang non manusia.

F. Teknik Analisis Data

Data yang didapatkan dianalisa sesuai yang ditulis Miles and Huberman (1984) yaitu aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.



Gambar 3.1

Model interaktif dalam analisis data

Setelah semua data direduksi maka data kemudian ditampilkan. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan, yang paling

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

G. Pengecekan Validitas Temuan

Uji kredibilitas dilakukan dengan peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *memberchek*.

Metode pengumpulan data yang bersifat triangulasi di atas juga membantu dalam menguji kredibilitas data dengan teknik pengumpulan yang berbeda.

Untuk menguji validitas data dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi itu sendiri menurut Denzim dibedakan menjadi empat macam sebagai teknik pengujian data yaitu : dengan menggunakan sumber, metode, penyidik dan teori. (Moleong, 1994). Yang paling sering digunakan adalah pengumpulan data, penyajian data, verifikasi, kesimpulan reduksi data, pengujian dari sumber lainnya.

Pengujian dilakukan oleh penulis dengan cara (1) membandingkan data observasi dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan oleh informan di depan umum dan secara pribadi; (3) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang memiliki latar belakang yang berlainan; (4) membandingkan apa yang dikatakan informan dalam situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu

itu; dan (5) membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berlaku.

H. Jadwal dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian adalah selama bulan April dan Mei 2016 di Kabupaten Sinjai dengan berbagai tahap antara lain : (1) tahap persiapan dengan penyusunan proposal penelitian ini, konsultasi dosen pembimbing serta melakukan seminar proposal untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan proposal dan kemudian mengurus izin penelitian; (2) tahap pelaksanaan yang dilakukan dengan mendatangi kantor LPSE Kab. Sinjai dan melakukan observasi, wawancara serta pengumpulan dokumentasi. Tanya jawabnya dilakukan dengan merekam menggunakan mp3 recorder atau video recorder dari ponsel cerdas yang peneliti punya termasuk mengambil foto dan mencatat.; dan (3) tahap pembuatan laporan dimana semua data yang terkumpul akan dianalisa dan dideskripsikan sesuai dengan metode yang disebut di atas.

Jadwal pelaksanaannya bisa dilihat secara lengkap dari tabel berikut ini :

No.	Kegiatan	Bulan (2016)				
		3	4	5	6	7
1	Penulisan Proposal dan Konsultasi					
2	Seminar Proposal Penelitian					
3	Pengumpulan Data dan Penelitian Lapangan					
4	Penulisan Laporan Penelitian dan konsultasi ke pembimbing					
5	Seminar Hasil Penelitian					
6	Seminar Tesis					

Tabel 3.2

Jadwal Penelitian

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kabupaten Sinjai



Gambar 4.1. Peta Kabupaten Sinjai

Sinjai adalah salah satu Kabupaten dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan tiga Kabupaten yaitu Bone di sebelah utara, Bulukumba di sebelah selatan, dan Gowa di sebelah barat. etak astronomisnya antara $5^{\circ} 2' 56''$ dan $5^{\circ} 21' 16''$ Lintang Selatan dan antara $119^{\circ} 56' 30''$ dan $120^{\circ} 25' 33''$ Bujur Timur. Adapun luas wilayahnya mencapai $819,96 \text{ km}^2$.

Sebagian besar desa di Kabupaten Sinjai merupakan desa bukan tepi laut. Dari seluruh luas lahan di Sinjai sekitar 54,02 persen berada di ketinggian antara 100-500 meter. Sementara, sekitar 31,25 persen lahan termasuk dalam kategori bergelombang sampai bergunung.

Selama periode tahun 2012-2014, jumlah kecamatan di Sinjai tidak mengalami perubahan yang diakibatkan karena pemekaran. Jumlah kecamatan sebanyak 9. Jumlah desa/kelurahan juga tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 80. Sementara itu, jumlah dusun atau lingkungan mengalami penambahan sebanyak 5 dusun atau lingkungan pada tahun 2013 dan tidak mengalami perubahan pada tahun 2014.

Komposisi penduduk Sinjai didominasi oleh penduduk muda/dewasa. Dari piramida penduduk Sinjai tahun 2014 dapat dilihat mengenai penduduk usia 0-4 tahun yang jumlahnya lebih kecil dari kelompok penduduk usia yang lebih tua yaitu 5-9 tahun. Ini berarti pemerintah telah mempertahankan tingkat pertumbuhan yang lebih rendah dibanding sebelumnya. Hal ini seharusnya dapat terus dipertahankan oleh pemerintah dalam kebijakan di bidang kependudukan ke depan sehingga tidak terjadi ledakan jumlah penduduk di wilayah ini.

Jumlah penduduk Sinjai mencapai 232.612 jiwa pada tahun 2012. Angka ini terus meningkat dan pada tahun 2014 penduduk Sinjai telah mencapai 236.497 jumlah jiwa. Selama periode 2013-2014 tingkat

pertumbuhan penduduk tercatat mengalami penurunan yaitu dari 0,97 persen pada tahun 2013 menjadi 0,68 persen pada tahun 2014. Dengan luas wilayah sekitar 819,96 km² , setiap km² ditempati penduduk sebanyak 288 orang pada tahun 2014.

Secara umum jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Hal ini dapat ditunjukkan oleh sex ratio yang nilainya lebih kecil dari 100. Pada tahun 2014, untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 93 penduduk laki-laki. Adapun rata-rata anggota keluarga dalam setiap keluarga pada tahun 2014 yaitu sebanyak 4 orang.

Dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), sekitar tujuh puluh persen penduduk Sinjai termasuk dalam angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Sinjai selama periode 2013-2014 berada di atas 65 persen yaitu 70,34 persen dan 68,78 persen.

Pasar tenaga kerja Sinjai juga ditandai dengan tingginya angka kesempatan kerja. Hal ini dapat dilihat pada tingginya persentase penduduk usia kerja yang bekerja yang besarnya mencapai lebih dari 90 persen pada tahun 2013 maupun tahun 2014. Tingkat pengangguran terlihat mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2014. Pada tahun 2013 tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 0,43 persen dan 0,88 persen pada tahun 2014.

Berdasarkan perbandingan menurut tiga sektor utama, pilihan bekerja di sektor pertanian masih mendominasi pasar kerja di Sinjai

dengan persentase sebesar 66,52 persen. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun sektor selanjutnya yang cukup diminati yaitu sektor jasa-jasa dengan persentase sebesar 31,07 persen pada tahun 2014. Persentase ini sedikit menurun dibanding tahun 2013 yang berkisar sekitar 32,94 persen. Sementara pekerja di sektor manufaktur sebanyak 1,31 persen pada tahun 2013 dan sebanyak 2,41 persen pada tahun 2014. Komposisi tersebut tampaknya tidak banyak mengalami perubahan selama kurun waktu 2013-2014.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Sinjai sedikit berkurang dari 2.656 orang pada tahun 2013 menjadi 2.552 orang pada tahun 2014. Dilihat berdasarkan komposisi pegawai menurut jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki jauh lebih besar daripada jumlah pegawai perempuan. Bila dirinci, maka dapat diketahui bahwa jumlah pegawai baik laki-laki maupun perempuan mengalami penurunan sekitar 3,16 persen dan 4,78 persen.

Pembiayaan pembangunan pada pemerintah Kabupaten Sinjai tahun 2013 menghabiskan anggaran sekitar 633 milyar rupiah. Jumlah ini meningkat sekitar lima persen dibanding dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh naiknya belanja pegawai sekitar 8 persen bila dibanding dengan tahun 2012.

Pada tahun 2013, dari total APBD sebesar 686,77 milyar, PAD hanya menyumbang sebesar 24,04 milyar atau sekitar 3,50 %.

Sementara DAU menyumbang dengan porsi yang sangat besar yaitu sebesar 474,53 milyar atau sekitar 69,09 % .

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dengan melihat perkembangan angka IPM tiap tahun, tampaknya kemajuan yang dicapai Sinjai dalam pembangunan manusia tidak terlalu signifikan. Angka IPM Sinjai hanya mengalami sedikit peningkatan dari 63,47 pada tahun 2013 menjadi 63,83 pada tahun 2014. Lambatnya kenaikan IPM ini dapat dipahami, mengingat dampak dari investasi di sektor kesehatan dan pendidikan khususnya terhadap peningkatan indikator penyusun IPM terlihat secara nyata dalam jangka panjang.

Tingkat kemiskinan di Sinjai tergolong rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan. Persentase penduduk miskin di Pangkep dan Jeneponto mencapai 17,75 persen dan 16,52 persen pada tahun 2013. Adapun Persentase penduduk miskin di Sinjai mencapai 10,32 persen pada tahun 2012.

Di sektor komunikasi, secara umum terdapat perkembangan yang positif khususnya akses penduduk terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2013, sekitar 2,63 persen rumah tangga mempunyai telepon kabel. Sementara rumah tangga yang memiliki

telepon seluler sebanyak 84,97 persen. Adapun rumah tangga yang mengakses internet sekitar 11,69 persen.

Listrik adalah sumber energi utama dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa listrik banyak kegiatan yang terhambat. Apalagi di zaman sekarang, hampir semua peralatan membutuhkan energi listrik. Di negara kita, energi listrik dikelola oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN). Jumlah pelanggan listrik PLN di Kabupaten Sinjai dari tahun 2012 sampai dengan 2014 mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, tercatat ada 38.676 pelanggan atau meningkat sekitar 7,03 persen bila dibandingkan tahun sebelumnya.

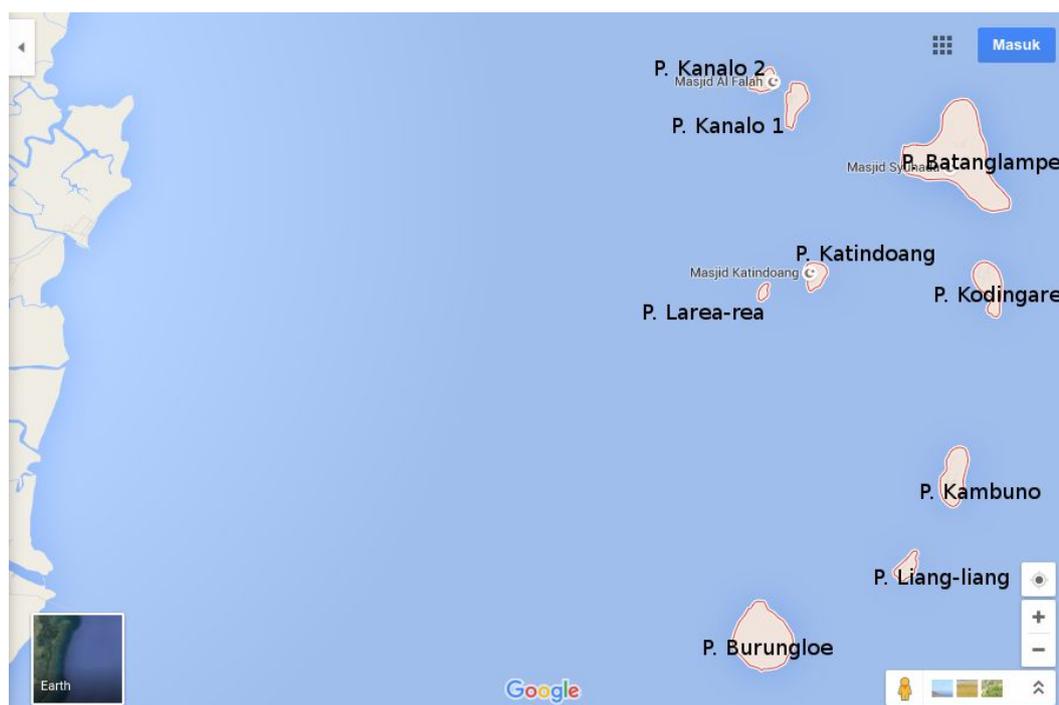
Ketersediaan sarana air bersih diatasi dengan pembuatan sumur-sumur di beberapa tempat. Ada sumur yang difungsikan untuk umum dan juga ada rumah-rumah yang membuat sumur sendiri untuk keperluan rumah tangganya.

Suhu udara rata-rata di Sinjai berkisar antara 21,1°C sampai dengan 32,4°C. Tempat-tempat yang letaknya berdekatan dengan pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi. Sementara kelembaban udara rata-rata bervariasi antara 64 persen sampai dengan 87 persen.

Sinjai mempunyai curah hujan berkisar antara 2000 - 4000 mm per tahun, dengan hari hujan yang bervariasi antara 100 - 160 hari hujan per tahun. Pada tahun 2014, curah hujan rata-rata mencapai

2709 mm. Sementara, jumlah hari hujan di Sinjai rata-ratanya mencapai 186 hari.

2. Kecamatan Pulau Sembilan



Gambar 4.2. Peta Kecamatan Pulau Sembilan dilihat dari google map

Kecamatan Pulau Sembilan merupakan kecamatan di Kabupaten Sinjai yang terpisah dari daratan Sinjai dan berupa kepulauan. Kecamatan ini terdiri dari sembilan pulau dengan luas wilayah yaitu 7,55 km² dan terletak sekitar 12 mil dari Ibu kota Kabupaten Sinjai. Secara geografis Kecamatan Pulau Sembilan terletak di perairan Teluk Bone. Kecamatan Pulau Sembilan berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah timur.

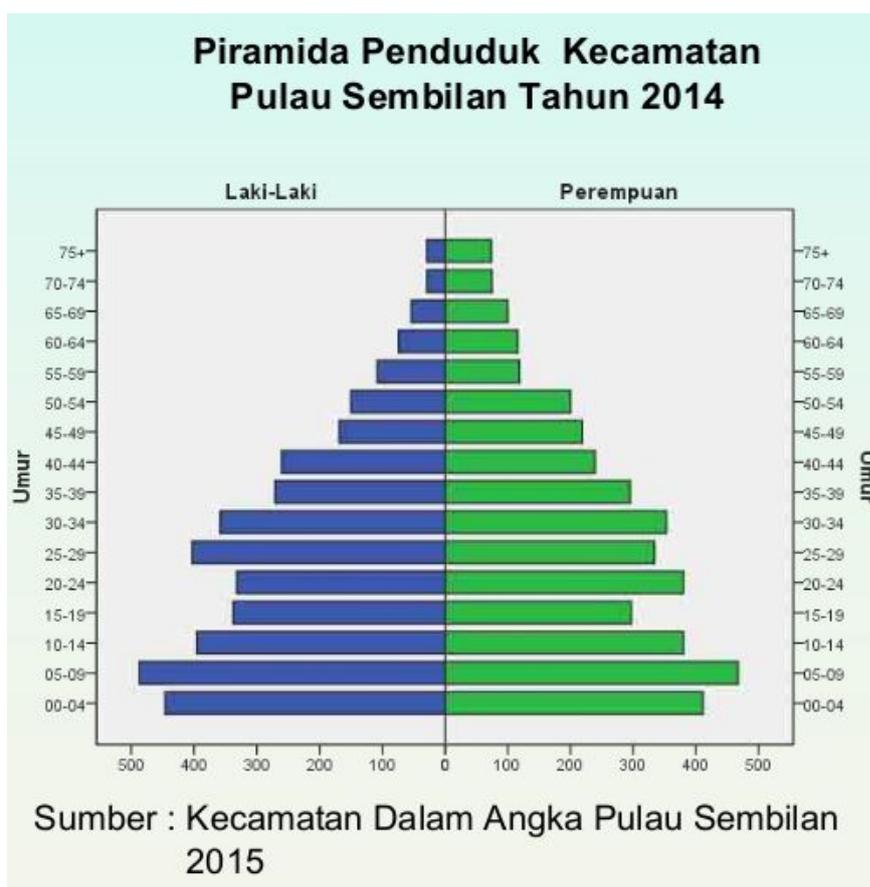
Selain satu-satunya kecamatan di Kabupaten Sinjai yang berupa kepulauan, Pulau Sembilan merupakan kecamatan terkecil yang memiliki persentase wilayah sebesar 1% dari luas total wilayah Kabupaten Sinjai yaitu 819,96 km². Kecamatan Pulau Sembilan mempunyai iklim panas dengan suhu udara pada siang hari berkisar antara 29,1°C sampai dengan 32,4°C.

Pemerintahan Kecamatan Pulau Sembilan terpusat di Desa Pulau Harapan, tepatnya Pulau Kambuno. Hal tersebut dapat dibuktikan dari letak Kantor Kecamatan dan beberapa fasilitas lainnya seperti puskesmas dan beberapa sekolah.

Secara administrasi kecamatan Pulau Sembilan mempunyai 4 desa yang terbagi dalam 13 dusun, 21 RW (Rukun Warga) dan 41 RT (Rukun Tetangga). Dari 4 desa tersebut, 3 diantaranya merupakan desa swadaya yaitu Desa Pulau Buhung Pitue, Desa Pulau Padaelo, dan Desa Pulau Persatuan. Sedangkan Desa Pulau Harapan merupakan desa swakarya.

Kecamatan Pulau Sembilan memiliki jumlah penduduk 7.963 jiwa yang terdiri dari 3.904 laki-laki dan 4.059 perempuan dengan kepadatan penduduk sebesar 1.055 jiwa/km². Desa Pulau Harapan merupakan desa yang memiliki luas wilayah paling kecil namun paling padat penduduknya, dimana desa ini memiliki kepadatan penduduk 1.961 jiwa/km².

Secara umum jumlah penduduk perempuan lebih besar dari pada jumlah penduduk laki-laki dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 96 dimana setiap 100 penduduk perempuan terdapat 96 penduduk laki-laki .



Gambar 4.3. Piramida Penduduk Kecamatan Pulau Sembilan 2014

Komposisi penduduk terlihat pada piramida penduduk Kecamatan Pulau Sembilan yang didominasi penduduk muda/dewasa. Hal ini berarti bahwa pemerintah telah mempertahankan tingkat pertumbuhan yang lebih rendah dari sebelumnya, terbukti jumlah penduduk usia 0-4

tahun lebih kecil dari usia 5-9 tahun. Hal ini tentu sesuai dengan kebijakan pemerintah dan sudah selayaknya untuk dapat dipertahankan guna mencegah terjadinya ledakan jumlah penduduk di kecamatan ini.

Secara statistik jumlah fasilitas dan aparat layanan masyarakat di Kecamatan Pulau Sembilan masih sangat minim dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Distribusi pegawai pemerintah masih terfokus pada bidang kesehatan. Jumlah pegawai di puskesmas yang berjumlah 15 orang jauh lebih banyak dibandingkan jumlah pegawai pemerintah pada instansi-instansi lainnya di Kecamatan Pulau Sembilan.

Pendidikan merupakan salah satu faktor paling penting dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Tahun 2012, Kecamatan Pulau Sembilan telah memiliki sarana pendidikan milik pemerintah daerah. Terdapat 10 Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah siswa 1.257 orang, 3 Sekolah Menengah Atas (SMP) dengan jumlah siswa 310 orang dan 1 Madrasah Tsanawiyah (MTs) dengan jumlah siswa 55 orang. Sebagai wilayah kepulauan, Pulau Sembilan mempunyai tantangan tersendiri dalam hal transportasi.

Transportasi umum dari satu pulau ke pulau lainnya belum tersedia sehingga sebagian besar penduduk menamatkan pendidikannya hanya sampai jenjang Sekolah Dasar. Melihat fakta tersebut, pemerintah berupaya keras meningkatkan pendidikan di Pulau Sembilan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan dibukanya satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Desa Pulau Harapan dengan

jumlah siswa yaitu 100 orang. Di Kecamatan Pulau Sembilan juga terdapat 41 kelompok belajar perguruan baca Al-Qur'an dengan jumlah siswa sebanyak 663 orang.

Dalam bidang kesehatan, fasilitas maupun tenaga kesehatan Kecamatan Pulau Sembilan terbilang masih rendah dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Sinjai. Jumlah fasilitas kesehatan di kecamatan ini terdiri dari 7 Polindes (Pondok Bersalin Desa), 2 Poskesdes (Pos Kesehatan Desa), 13 Posyandu (Pos Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Terpadu), 1 Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) terletak di Ibukota Kecamatan serta 3 Pustu (Puskesmas Pembantu) terletak di masing-masing Desa Pulau Buhung Pitue, Pulau Padaelo dan Pulau Persatuan.

Selain fasilitas yang minim, jumlah tenaga kesehatan pun jauh dari cukup. Tenaga dokter hanya ada 1 orang yaitu dokter umum yang bertugas di Puskesmas Desa Pulau Harapan. Hal ini menyebabkan banyak warga desa lain memilih berobat ke ibukota kecamatan karena ketersediaan penunjang kesehatan seperti obat-obatan dan tenaga kesehatan yang belum ada di desa mereka. Selain itu biaya yang terjangkau membuat mereka memilih puskesmas dibandingkan harus ke rumah sakit di Ibukota Kabupaten.

Dalam proses industri, baik jumlah rumah tangga pengusaha/pemilik maupun rumah tangga buruh, terbanyak ada di

Desa Pulau Harapan yaitu 132 rumah tangga pengusaha/pemilik dan 360 rumah tangga buruh.

Banyak rumah tangga buruh di Kecamatan Pulau Sembilan cukup signifikan dibandingkan dengan rumah tangga pengusaha/pemilik. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia di Kecamatan Pulau Sembilan masih cukup rendah.

Kecamatan Pulau Sembilan merupakan kecamatan di Kabupaten Sinjai yang memiliki potensi cukup besar di bidang perikanan. Setiap tahun kecamatan ini melakukan ekspor hasil produksi perikanan. Rumput laut merupakan komoditas utama yang memiliki persentase produksi terbesar sebesar 94% atau sekitar 8.054 ton. Sedangkan hasil produksi ikan yang paling besar adalah ikan tuna dengan persentase produksi sebesar 4% atau sekitar 312,12 ton.

Dari seluruh total rumah tangga di Kecamatan Pulau Sembilan yaitu sekitar 864 rumah tangga bekerja di sektor perikanan. Terdapat 144 rumah tangga bertindak sebagai pengusaha dan 720 rumah tangga bertindak sebagai buruh.

Meskipun memiliki potensi di sektor perikanan, pada kenyataannya masih banyak rumah tangga yang bertindak sebagai buruh dibandingkan pengusaha. Kualitas Sumber Daya Manusia di Pulau Sembilan yang terbilang masih rendah perlu untuk ditingkatkan sehingga potensi di sektor perikanan dapat dimaksimalkan.

Perdagangan adalah salah satu cara dalam pemenuhan ragam kebutuhan baik pangan maupun non pangan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Ketersediaan pusat perdagangan / pasar di kecamatan ini hanya ada di Ibukota Kecamatan serta terdapat 1 pasar umum di Desa Pulau Buhung Pitue namun bangunan pasar belum tersedia di Desa Pulau Buhung Pitue. Selain pasar, sarana perdagangan di Kecamatan Pulau Sembilan lainnya yaitu toko/kios dan warung/rumah makan. Tidak cukup bervariasi barang maupun jasa yang ditawarkan. Terdapat 197 toko/kios di Kecamatan Pulau Sembilan yang menjual barang campuran. Tiga tahun terakhir, banyaknya toko/kios yang menjual barang campuran mengalami kenaikan.

Sebagai penghasil ikan, kecamatan Pulau Sembilan tidak memiliki pasar khusus untuk menjual hasil tangkapan para nelayan yang mengakibatkan para nelayan langsung menjual hasil tangkapan mereka di Tempat Pelelangan Ikan di Sinjai Utara ataupun keluar kabupaten.

Walaupun sebagai pulau kecil di tengah laut, tidak semua penduduk pulau yang ada menjadi penangkap ikan. Mata pencaharian penduduk pulau Kodingare menurut kepala dusunnya hanya budidaya rumput laut. Ini memang terlihat sejak masuk ke pulau tersebut tempat untuk menjemur rumput laut sangat luas. Bahkan dibuatkan tempat tersendiri di atas pantai di jembatan tambatan perahunya. Pulau Kanalo 1 dan Kanalo 2 juga mata pencaharian utamanya adalah dari rumput laut.

Mobilitas penduduk sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana transportasi. Tahun 2012, hanya ada 7 kapal angkutan umum yang melayani masyarakat Pulau Sembilan dalam melakukan mobilitas mereka. Ketersediaan armada yang minim ini mengakibatkan keterbatasan mobilitas masyarakat dari satu pulau ke pulau lainnya dikarenakan kapal angkutan hanya melayani rute dari desa ke ibukota kabupaten.

Untuk menjangkau pulau-pulau lain yang belum mempunyai kapal angkutan umum, masyarakat biasanya menumpang pada kapal nelayan yang kebetulan mempunyai tujuan yang sama.

Masyarakat pulau lebih memilih Ibukota Kabupaten Sinjai untuk membeli kebutuhan sehari-hari mereka meski memakan waktu perjalanan yaitu satu sampai tiga jam. Hal ini dikarenakan sarana transportasi yang melayani rute ke Ibukota Kecamatan belum tersedia. Tahun 2014, banyaknya kapal yang dimiliki oleh rumah tangga di Kecamatan Pulau Sembilan mengalami peningkatan dibandingkan 4 tahun sebelumnya yaitu bertambah 2 buah (BPS : 2015).

3. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Sebagian besar penduduk di Kecamatan Pulau Sembilan menggunakan listrik non PLN sebagai sumber penerangan sebanyak 957 rumah tangga. Listrik non PLN yang digunakan diantaranya generator dan tenaga surya. Penggunaan generator sebagai sumber

penerangan paling banyak dikonsumsi oleh rumah tangga di Desa Pulau Buhung Pitue yaitu sebanyak 251 rumah tangga. Namun, jumlah generator yang dimiliki hanya 3 buah. Saat ini di desa Buhung Pitue di Pulau BurungLoe sedang dibangun PLTS dengan kapasitas besar 100KWp. Setiap rumah akan mendapatkan listrik sebesar 300 Watt.

Beda halnya dengan Desa Pulau Padaelo dan Desa Pulau Persatuan. Kedua desa tersebut memiliki jumlah rumah tangga konsumen generator yang tidak sebanyak Desa Pulau Buhung Pitue. Namun, generator untuk penerangan yang dimiliki kedua desa tersebut cukup banyak.

Desa Pulau Padeolo pernah mendapatkan PLTS pada pengadaan 2013, tapi hingga saat ini tidak berfungsi dengan baik. Terlihat peralatan PLTS-nya sudah tidak terawat. PLTS yang ada di desa ini yang kemudian dianggap bermasalah oleh penegak hukum.

Desa pulau Persatuan telah menggunakan PLTS sejak tahun 2010 khususnya di pulau kanalo 2, namun karena sering tidak stabil maka PLTS dialihkan sebagai sumber listrik untuk lampu jalan sedangkan rumah-rumah menggunakan genset. Pulau Kanalo 1 sendiri sekarang punya PLTS yang telah melayani rumah penduduk sejak diadakan pada tahun 2014. Semua pulau-pulau tersebut dengan listrik yang dimilikinya hanya beroperasi rata-rata dari pkl. 18.00 hingga 23.00 kecuali di pulau Kambuno sebagai ibukota kecamatan yang beroperasi 18.00 - 06.00.

Disisi lain, satu-satunya desa yang menggunakan listrik PLN yaitu Desa Pulau Harapan, sebanyak 394 rumah tangga. PLN ini ada di pulau Kambuno. Tidak semua rumah tangga di desa tersebut menggunakan listrik PLN. Terdapat beberapa rumah tangga masih menggunakan generator dan tenaga surya sebagai sumber penerangan terutama di pulau Liang-Liang.

Pengadaan PLTS ini dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Sinjai. Sedangkan PLTS yang dikerjakan tahun 2016 ini langsung oleh Kementerian ESDM Republik Indonesia.



Panel Surya Dusun Kanalo 1



Baterai dan Inverter



Controller



Panel Saklar dan MCB



Transmisi melalui kabel +
lampu jalan



Ruangan PLTS di Dusun Kanalo 2
dengan Panel Surya di atap

Gambar 4.4. Bagian-bagian dari sebuah PLTS

Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sinjai juga mengadakan PLTS untuk menanggulangi permasalahan air bersih dengan membuat destilasi air yang mengubah air laut menjadi air tawar. Proses destilasi yang menjadi *pilot project* ada di pulau Kanalo 2 dan sumber tenaga yang dipakai untuk menggerakkan mesinnya adalah PLTS. Proses pengadaanya sendiri melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan.

4. Penggunaan Lelang Online dalam Lelang Proyek

Penelitian ini dilaksanakan antara tanggal 10 Mei dan 30 Juni 2016 yang bertujuan untuk mengetahui penggunaan media online pada pelaksanaan lelang Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Pulau Sembilan. Penelitian ini juga akan melihat keterbukaan informasi oleh media online tersebut yang tersedia untuk berbagai pihak yang punya kepentingan terhadap pelaksanaan lelang.

Miles dan Huberman (1992:16) mengatakan bahwa kategori-kategori dikembangkan dari permasalahan penelitian, hipotesis, konsep-konsep kunci dan tema-tema penting. Untuk itu peneliti memuat kategori pembahasan sebagai berikut :

1. Penggunaan media online dalam pelaksanaan proses lelang PLTS Pulau Sembilan,
2. Bentuk Transparansi dalam proses lelang melalui media online,
3. Faktor pendorong dan penghambat.

Penyajian data dibantu dengan variabel media online yang dikaitkan dengan pelaksanaan open government, open data dan prinsip transparansi berdasarkan kajian konsep yang telah ada untuk mempermudah penjabaran analisis, sebagai berikut :

- a. Transparansi, ada keterbukaan informasi
- b. Akurat dan Akuntabel
- c. Aksesibilitas, akses data yang mudah dan cepat untuk diakses
- d. Memudahkan pelayanan
- e. Interaktif
- f. Big Data
- g. Komprehensif

4.1. Bentuk Fisik Media Online Yang Digunakan Dalam Proses Lelang

Pengadaan barang/jasa yang dulunya sangat terkait dengan pasar pengadaan yang tidak terbuka, kurangnya kapasitas manajemen pengadaan oleh instansi pemerintah dari aspek pengorganisasian maupun jumlah dan kompetensi personelnnya, *bad governance* (tidak transparan dan tidak akuntabel, penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan tertentu sampai tindak pidana korupsi) sehingga pemerintah kemudian menerbitkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang diharapkan dapat menjadi sebuah solusi untuk menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan menjadi tonggak reformasi birokrasi pada bidang pengadaan barang dan jasa publik. Dikatakan

sebagai tonggak reformasi karena, dari konten atau isi Perpres Nomor 54 Tahun 2010 telah menggambarkan sejumlah perubahan yang baik untuk perbaikan dalam proses kegiatan pengadaan barang dan jasa yang sarat akan praktek-praktek KKN.

Perubahan-perubahan yang diusung oleh Perpres Nomor 54 Tahun 2010 antara lain: menciptakan iklim yang kondusif untuk persaingan sehat, efisiensi belanja negara, mempercepat pelaksanaan APBN/APBD, memperkenalkan prosedur yang lebih sederhana dengan tetap memperhatikan good governance, salah satunya adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang merupakan salah satu bentuk penerapan e-government di seluruh instansi pemerintah.

E-Government sudah lama dirintis di Kabupaten Sinjai, Kepala Dinas Kominfobudpar Sinjai mengatakan,

“Penerapan egov sudah lama dirintis contohnya semakin banyaknya aplikasi dan media online untuk pelayanan publik seperti Web Sinjai dan LPSE. Beberapa media online oleh Pemkab, EPBB, E-Arsip, E-Absen, PPID. Salah satu bentuk Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yaitu membentuk PPID sejak 2012 dan selain itu dengan website SKPD yang semakin tumbuh. Bupati sangat mendukung semua hal yang berkaitan dengan pelayanan publik termasuk KIP bahkan sudah ada sosialisasi UU KIP.” (Wawancara pada 11 Mei 2016).

Media online yang digunakan untuk mendukung lelang / tender selama ini adalah website Sinjai dan media online dari LPSE yaitu Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Arifuddin mengatakan,

“Pada intinya LSM, masyarakat bisa mengamati melalui media online LPSE dengan membuka website sinjai atau situs LPSE langsung. saya kita teman-teman lsm bisa mengikuti prosesnya melalui media tersebut.” (Wawancara pada 11 Mei 2016).

Rafiuddin juga mengatakan hal yang sama,

“Khusus mengenai website resmi Pemkab Sinjai hanya sebatas mengumumkan paket-paket saja yang di lelang di Kab. Sinjai tetapi untuk prosesnya dilakukan melalui aplikasi LPSE.” (Wawancara pada 11 Mei 2016).

Secara fisik, media online ini terdiri dari perangkat keras komputer yang di dalamnya semua perangkat lunak dikonfigurasi agar melaksanakan perintah-perintah dari pengelola dan pengguna sesuai keperluannya.

Perangkat keras untuk website Sinjai terdiri dari sebuah server yang diletakkan di Gedung Cyber Jakarta. Pada server ini terpasang website Sinjai yang dibuat menggunakan *Joomla CMS* dengan penyimpan data diatur oleh aplikasi MySQL.

Pada server website ini dipasang aplikasi surat elektronik dan *sub domain* semua website dari setiap SKPD, termasuk pengaturan nama domain dan surat elektronik untuk SPSE.

SPSE yang dibuat untuk diakses secara online juga memiliki sebuah server sendiri. Server ini berada di kantor Dinas KominfoBudpar Sinjai. Server dengan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi server website Sinjai. Khusus SPSE ini disiapkan 2 buah server, satu berfungsi sebagai server utama dan satu lagi sebagai server cadangan / *backup* data jika terjadi masalah pada server

utama. Server cadangan ini dibuat dalam bentuk virtual server dengan struktur aplikasi dan sistem operasi yang sama persis dengan server utama. Penyimpanan data SPSE ini diatur menggunakan aplikasi PostgreSQL.

Semua server dihubungkan ke internet. Server website Sinjai menggunakan internet dengan *bandwidth* 100 Mbps yang disediakan oleh pengelola *colocation* di gedung cyber jakarta, sedangkan server SPSE menggunakan *bandwidth* 1 Mbps dari paket Astinet yang disediakan oleh PT. Telkom. Pengelolaan server oleh *sysadmin* yang dilakukan secara *remote* (jarak jauh) dari jaringan yang tersedia.

Daftar dan spesifikasi perangkat keras dari media online untuk pelaksanaan lelang di Sinjai bisa dilihat pada tabel berikut ini,

No.	Perangkat Keras	Spesifikasi
1.	Server Website dan SPSE	Merek dan Type : IBM xSeries High Volume Racks x3530
		Prosesor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2403 0 @ 1.80GHz
		RAM : 4GiB
		HDD : 500 GB Type : WD5003ABYX-23
	Server <i>Backup</i> SPSE	Merek, Rainer Server
		Procesor : Intel® Xeon® processor E5-2600
		RAM : 4 GiB
		HDD : 500 GB
2.	Bandwith SPSE	1 Mbps
	Bandwith Website	100 Mbps

3.	Kartu Jaringan	Intel I350 Gigabit Network Connection, RJ45 ports
----	----------------	---

Tabel 4.1. Spesifikasi Perangkat Keras Server Media Online

4.2. Penggunaan Media Online dalam Proses Pelaksanaan Lelang PLTS

Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time* guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dasar hukum pembentukan LPSE adalah Pasal 111 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. LPSE dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perpres 54 tahun 2010 saat ini sudah punya turunan baru yaitu Perpres 4 tahun 2015.

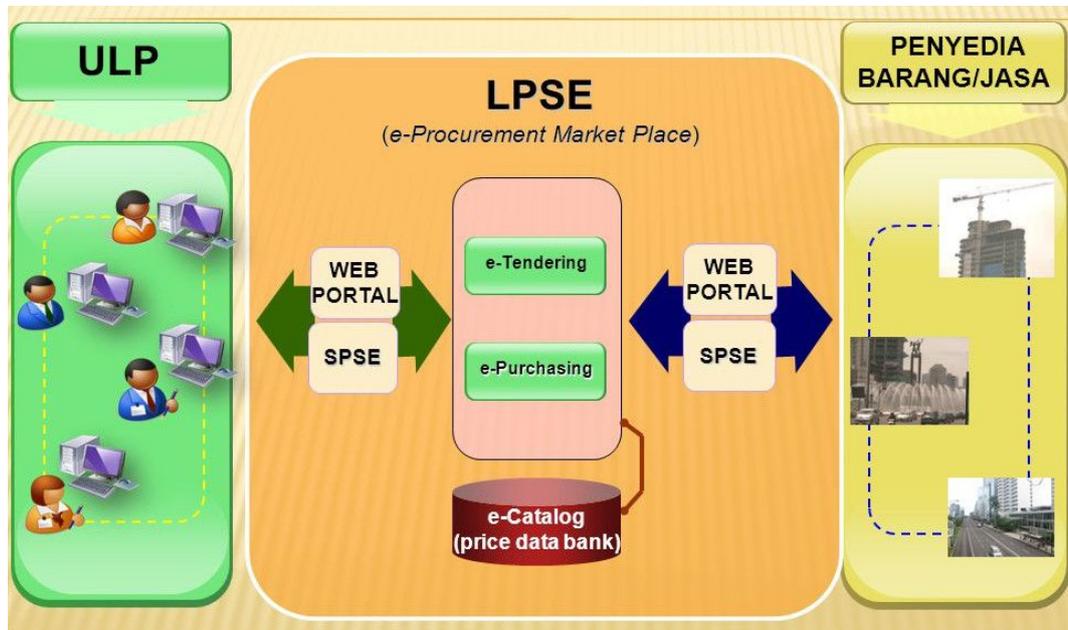
Supardi juga menjelaskan lebih jauh tentang penerapan LPSE di Kabupaten Sinjai bahwa :

“LPSE mendukung pemerintahan terbuka (*open government*), transparansi, keterbukaan informasi. semua proses pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sinjai. Jadi proses tender secara elektronik, seluruh skpd dan desa, dengan anggaran APBN yang masuk di desa, jika selama ini hanya anggaran SKPD yang masuk dalam publikasi, tapi saat ini hingga desa pun terpublikasi ke LPSE dalam bentuk Rencana Umum Pengadaan (RUP). berapa pun anggaran yang berupa pengadaan harus masuk terutama dari skpd, sekecil apapun nilainya semua harus masuk ke LPSE karena itu kewajiban kita untuk melakukan transparansi karena dipantau langsung. “ (Wawancara pada 11 Mei 2016).

Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik saat ini adalah e-tendering yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering. Selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (e-Catalogue) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah, proses audit secara online (e-Audit), dan tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik (e-Purchasing). (<https://lpse.lkpp.go.id/eproc/tentangkami>)

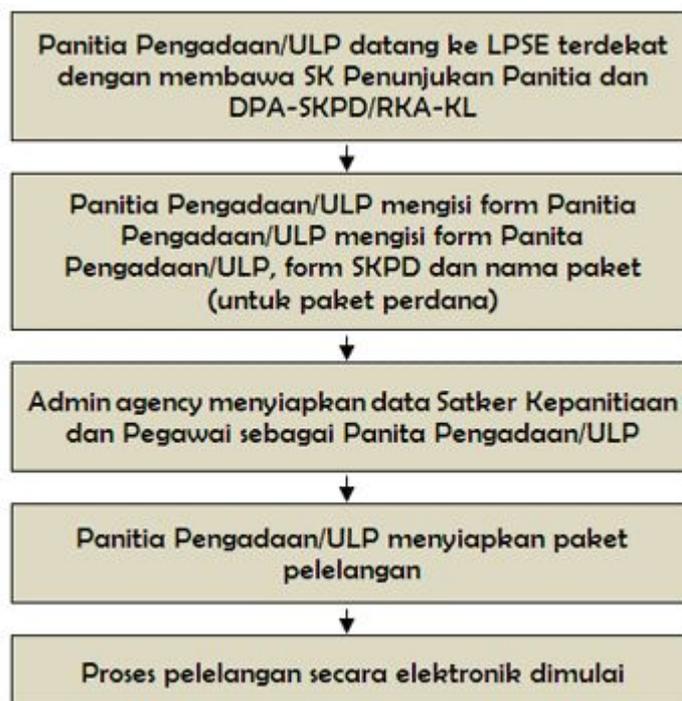
Lelang secara online sesungguhnya hanya memindahkan proses yang selama ini masih manual ke sebuah sistem/media elektronik yang telah diprogram dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Sistem ini kemudian dipasang di internet agar bisa diakses oleh

semua yang berkepentingan terhadap lelang terutama pihak ULP dan Penyedia Barang/Jasa. LPSE menjadi penyedia media ini.



Gambar 4.5. Kedudukan Media Online yang disiapkan oleh LPSE

Panitia atau ULP yang mengoperasikan LPSE sesuai dengan kelompok kerja yang telah dibentuk akan mengirim dan mengumumkan semua paket lelang ke SPSE.



Gambar 4.6. Prosedur Pendaftaran Paket Lelang oleh ULP

Penyedia yang telah terdaftar dalam sistem LPSE ini dan ingin mengikuti lelang atau tender yang sedang berjalan bisa melakukan login kemudian memilih paket lelang yang diinginkan.

Semua proses selanjutnya akan melalui SPSE termasuk proses komunikasi antara ULP dan Penyedia pada tahap penjelasan lelang dan sanggahan yang selalu diisi dengan tanya jawab.

Pelaksanaan proses lelang secara online ini disajikan oleh peneliti berdasarkan variabel-variabel dari sebuah media online berikut ini,

a. Transparansi

Penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ini diharapkan bisa melahirkan transparansi atau keterbukaan data

pada proses pengadaan barang dan jasa. Ketua LPSE Sinjai (Supardi) mengatakan bahwa :

“Tujuan utama adanya LPSE ini adalah dalam rangka mendukung pemerintahan yang baik, agar pemerintah melakukan transparansi sesuai UU no 14 tahun 2008. Pengelolaan anggaran APBN dan APBD terpublikasi ke semua masyarakat.” (Wawancara pada 11 Mei 2016).

Salah satu implementasi pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik ini adalah pada saat dilakukannya lelang PLTS untuk keperluan listrik di Pulau Sembilan yang tidak terjangkau oleh PLN dari pulau Kambuno sebagai pusat kecamatan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PLTS Pulau Sembilan 2014 dan 2015 dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ali mengatakan :

“Energi baru dan terbarukan, dari pusat dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) mencari potensi energi, sesuai petunjuk teknis, dimungkinkan untuk daerah yang tidak punya listrik. Untuk PLTS terpusat bagi pemukiman padat penduduk, dan lokasi sempit dan padat, karena itu Pulau Sembilan sangat cocok untuk PLTS terpusat. bisa memakai tenaga bayu tapi lebih bagus dengan PLTS. Ini semua sesuai petunjuk teknis dari pusat (Kementerian ESDM) dan juga usulan masyarakat desa di Pulau Sembilan.” (Wawancara pada 24 Mei 2016)

Lebih jauh lagi, Ali menjelaskan bahwa PLTS yang dibangun saat ini (2016) ada di Desa Buhung Pitue dan anggarannya dari DAK dan langsung ditangani oleh Kementerian ESDM,

“Alhamdulillah 2016 ini Pemkab Sinjai kembali mendapat bantuan lewat kementerian ESDM di Desa Buhung Pitue, anggarannya besar karena bisa melayani 400 Kepala Keluarga (KK), ini kebijakan kementerian yang dulunya dananya diserahkan ke kabupaten, di tahun 2016 ini DAK langsung

dilakukan di provinsi. dan di Sinjai Borong dibangun PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro). Tender 2016 ini langsung di LPSE pusat. dan total daya kurang tahu, ini kalo tidak salah 35 KVA, di pulau Leang-leang 25 KVA.” (Wawancara pada 24 Mei 2016)

Penggunaan dana dari pemerintah yang sumbernya dari pajak dan pendapatan pemerintah lainnya maka pada proses lelang tentunya ini harus bisa dilihat secara transparan. Peneliti mulai mencari informasi lebih dalam lagi tentang penggunaan media online oleh Pemkab Sinjai dan keterbukaan informasi pada proses lelang secara umum melalui LPSE dan secara khusus ke lelang PLTS di Pulau Sembilan.

Masyarakat secara umum bisa melihat semua jenis pengadaan yang dilakukan melalui LPSE. Cukup mengetikkan nama paket pengadaan yang dicari maka akan muncul semua jenis paket yang sesuai. Lengkap dengan jumlah anggaran dan tahapan-tahapan yang sedang berlangsung. Rafiuddin, Pokja PLTS Sinjai mengatakan :

“Ya, inilah yang perlu saya sampaikan bahwa salah satu manfaat dengan adanya aplikasi SPSE ini adalah transparansi jadi punya prinsip transparansi hingga semua masyarakat umum dapat melihat proses pelelangan antara pokja dan penyedia bisa dilihat di aplikasi tersebut.” (Wawancara pada 11 Mei 2016)

Peneliti mencoba mengakses situs LPSE Sinjai dan mencari dengan penggunaan kata kunci PLTS. Hasil yang didapat seperti pada gambar berikut ini.

No	Nama Lelang	Agency	Tahap	HPS
1	Pembangunan PLTS Terpusat 2015 (Lelang Ulang Ke-3) Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran - Pemenang Kategori : Pekerjaan Konstruksi Jenis : e-Lelang Pemilihan Langsung Lelang Metode : Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur Nilai : Rp 3.232.983.000,00 Kontrak	PEMKAB SINJAI	Lelang sudah selesai	3,3 M
2	Pengawasan Pembangunan PLTS Terpusat Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran - Pemenang Kategori : Jasa Konsultansi Badan Usaha Jenis : e-Seleksi Sederhana Lelang Metode : Pascakualifikasi Satu File - Biaya Terendah Nilai : Nilai Kontrak belum dibuat Kontrak	PEMKAB SINJAI	Lelang sudah selesai	62,1 jt
3	Pembangunan PLTS Terpusat Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran - Pemenang Kategori : Pekerjaan Konstruksi Jenis : e-Lelang Umum Lelang Metode : Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur Nilai : Rp 2.469.483.000,00 Kontrak	PEMKAB SINJAI	Lelang sudah selesai	2,54 M
4	PEMBANGUNAN PLTS TERPUSAT PULAU BATANGLAMPE DAN PULAU KODINGARE DESA PADA ELO KECAMATAN PULAU SEMBILAN (LELANG ULANG) Pengumuman - Peserta - Harga Penawaran Kategori : Pekerjaan Konstruksi Jenis : e-Lelang Umum Lelang Metode : Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur Nilai : Nilai Kontrak belum dibuat Kontrak	PEMKAB SINJAI	Lelang sudah selesai	3,02 M

*) Link Harga Penawaran Hanya muncul jika lelang tersebut menggunakan metode pascakualifikasi satu file

Gambar 4.6. Hasil Pencarian Lelang PLTS di LPSE Sinjai

Gambar 4.6 memperlihatkan daftar paket PLTS yang sedang atau telah dikerjakan juga memberikan tautan informasi tentang peserta dengan harga penawaran masing-masing dan pemenang lelang.

Adanya kasus yang menyebabkan Kepala Dinas ESDM ditahan berkaitan dengan lelang PLTS tahun 2013 tidak berhubungan dengan transparansi ataupun proses lelang lainnya tapi adanya kesalahan dalam persoalan kebijakan dan juga saat itu masih proses transisi dari lelang manual ke elektronik menggunakan LPSE, seperti yang dikatakan oleh Muhammad Ali,

“Untuk kasus 2013 saya belum ikut ambil andil, utk 2013 ada kesalahan persoalan kebijakan dari Dinas ESDM bapak Andi

Mulawansah, saat itu proses transisi dari lelang manual ke elektronik. PT Panrita Elekrika menang, semua lancar namun diakhir ada yang tidak sesuai spesifikasi dan tindakan kepala dinas sudah betul dengan tidak membayarkan namun dari situ menurut penegak hukum ada yang bermasalah, karena dari sisi kerugian negara tidak ada karena semua sudah dikembalikan hanya saja menurut penegak hukum ada peluang terjadinya kerugian negara sehingga tetap diproses.” (Wawancara pada 24 Mei 2016)

b. Akurat dan Akuntabel

Penggunaan media online dalam penyajian informasi sama dengan media lain yang membutuhkan keakuratan dan akuntabilitas. Konten media ini tepat dan bisa dipertanggungjawabkan. Informasi yang tersedia di website Sinjai maupaun di media LSPE sinjai semua adalah data yang bisa dipertanggungjawabkan. Para pengisi konten media selalu memantau semua proses yang berjalan. Pemberian informasi dari pemerintah melalui media online ini juga telah diatur melalui Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU ini adalah peraturan yang dibuat untuk menjamin pemenuhan hak publik dibidang keterbukaan informasi.

Arifuddin selaku ketua Pokja ULP menjelaskan bahwa pelaksanaan lelang / tender di Pemkab Sinjai sudah berjalan sesuai mekanisme yang diatur dalam perpres 54 tahun 2010. Arifuddin menambahkan,

“Sejak diberlakukan 2012, sudah hampir tahun ketiga ini sudah sekitar 300 paket yang dilelang secara online. Cara kerja tender proyek termasuk PLTS itu sama melalui LPSE.

pengadaan di atas 200 juta oleh perpres 2010 itu wajib melalui media online, untuk konsultan diatas 50 juta. Semua proses harus sesuai SOP yang dibuat oleh ULP.” (Wawancara pada 11 Mei 2016)

Semua anggota pokja ULP PLTS mengatakan bahwa mereka selalu memantau LPSE setelah mengirim satu jenis pekerjaan pengadaan. Suharman mengatakan :

“Selaku anggota pokja, 24 jam kita mengamati perkembangan. bilamana kita mengumumkan suatu paket maka kita selalu mengamati perkembangannya selama 24 jam.” (Wawancara pada 12 Mei 2016)

PPK selaku pemberi pekerjaan juga selalu memantau LPSE untuk melihat perkembangan proses lelang yang terjadi. Ali mengatakan :

“Terkait proses pelelangan paket PLTS Pulau Sembilan tahun 2014 dan 2015 DAK sharing APBD setelah kita menggunakan LPSE Sinjai secara profesional sangat membantu dengan jabatan selaku PPK bekerja sama panitia lelang bekerja secara maksimal bisa dipantau lewat sistem yang ada, semua proses tatap muka dengan rekanan sudah tidak ada sehingga bisa mengurangi tekanan, namun sistem ini perlu terus dikembangkan agar lebih baik”. (Wawancara pada 24 Mei 2016)

Pengelola website Sinjai sendiri telah berusaha menyediakan data-data yang dibutuhkan oleh pengunjung terutama informasi yang berkaitan dengan SKPD dan aturan daerah yang ada. Penyediaan data ini berdasarkan statistik kunjungan dan log pencarian data yang ada di website Sinjai, bahkan menyediakan tempat untuk tanya jawab. Dinas Kominfo juga telah menyediakan tempat serta sub domain untuk SKPD yang siap mengelola

websitenya agar data-data yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa tersedia terutama mengenai kebijakan pemerintah. Haryanti Arif mengatakan,

“Kunjungan ke web sinjai rata-rata tentang berita, peraturan-peraturan dan perda, serta berita-berita tentang instansi tertentu dan program-program pembangunan di desa. ada *link* yang khusus menerima pertanyaan. Ada beberapa SKPD yang sudah punya website dan semua *terlink* langsung ke website Sinjai. saat ini ada 15 SKPD yang sudah tersedia websitenya. Kita punya tim khusus untuk mengumpulkan permintaan data ataupun keluhan masyarakat, kita meminta kontributor *news* untuk mendatangi SKPD dan kemudian membuatkan beritanya dan juga membalas email atau pertanyaannya.” (Wawancara pada 20 Mei 2016)

Ketersediaan data publik juga semakin dipermudah dengan dukungan dari Bupati Sinjai seperti penjelasan dari Supardi yang mengatakan,

“Untuk open data saya kira apa yang saya sampaikan bahwa pemkab dalam hal ini bapak Bupati sangat terbuka akan data-data dalam lingkup pemkab baik yang APBD dan APBN bisa diakses secara luas oleh masyarakat. SKPD diharapkan bisa membuka media center dan diharapkan masyarakat bisa membuka website SKPD. Pak Sekda selaku penanggung jawab mengharapkan agar setiap SKPD mengaktifkan PPID-nya”. (Wawancara pada 11 Mei 2016)

Tentang open government ini pun, Muallim mengatakan,

“Pelaksanaan pemerintahan open government, terkait visi misi bapak Bupati Sinjai. sepanjang pengamatan kami sebagai auditor, semua yang diminta masyarakat selalu berusaha kami sampaikan.” (Wawancara pada 27 Mei 2016)

Informasi lelang yang ada di LPSE sudah memenuhi bagi penyedia karena mereka bisa melihat apa saja paket yang dilelang

termasuk dengan semua berkas dan spesifikasi pekerjaan yang diperlukan. Andi Toto mengatakan,

“Kami memanfaatkan teknologi sebagai kebutuhan primer dalam proses tender/lelang karena dengan teknologi apa yg kami butuhkan sudah tersedia baik itu spek barang maupun jenis dan yg lainnya.” (Wawancara pada 28 Juni 2016)

c. Aksesibilitas, akses data yang mudah dan cepat

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 13.000 pulau. Infrastruktur teknologi informasi masih menjadi kendala besar dalam implementasi *e-procurement*. Di sebagian besar wilayah, internet masih merupakan barang yang mahal. *E-procurement* dalam hal ini LPSE memerlukan bandwidth yang cukup besar karena di dalamnya ada proses *upload* dokumen dengan ukuran beberapa *megabyte*. Sangat tidak efisien, atau tidak mungkin, jika ada satu *server* tunggal, di Jakarta misalnya, untuk melayani seluruh instansi di Indonesia. Ada lebih dari 600 instansi di seluruh Indonesia. Kecepatan internet di Indonesia juga masih lambat. Oleh karena itu maka penerapan LPSE di Indonesia diimplementasikan dengan cara LPSE tersebar dengan membentuk LPSE di masing-masing lembaga, instansi, kementerian, atau daerah.

Media selain LPSE yang menjadi induk media online di Sinjai adalah website www.sinjaikab.go.id. Situs ini telah mengalami perubahan nama domain dari yang dulunya www.sinjai.go.id.

Perubahan bentuk dan tampilan telah dilakukan menyesuaikan dengan perkembangan web yang semakin hari semakin berkembang. Penyediaan berita dan informasinya semakin ditingkatkan setiap saat agar bisa menjangkau lebih banyak *audience*, terutama dalam hal promosi berita dengan memanfaatkan media sosial dan media lainnya. Haryanti Arif selaku penanggung jawab website Sinjai mengatakan,

“Tim website bekerja berdasarkan SK Bupati Sinjai dengan penanggung jawab di Bidang Aptika. Ada tim kontributor news dari Radio SB, reporter Ssinjai TV dan media cetak Tribun Timur. Berita yang dipublikasi terkoneksi langsung ke twitter dan facebook terutama berita top hari itu, dan juga publikasi melalui Radio Sinjai dan Sinjai TV serta koran Tribun Timur.” (Wawancara pada 20 Mei 2016)

Perkembangan website tidak bisa lepas dari semakin berkembangnya teknologi internet yang kini telah menjadi kebutuhan dalam melakukan interaksi. Salah satu layanan yang digratiskan pemanfaatannya kepada masyarakat di Kabupten Sinjai melalui Dinas Kominfobudpar sebagai *leading* sektor yang menjadi pembantu Bupati dalam hal komunikasi dan informatika adalah menyediakan koneksi internet kepada masyarakat Sinjai.

Kepala Bidang Aptika Dinas Kominfo Sinjai, Supardi, mengatakan,

“Alhamdulillah penggunaan jaringan internet di Kabupaten Sinjai dalam mendukung *Good Government*. Untuk 2015 selain kita menyediakan pelayanan internet gratis di kantor Diskominfobudpar, kita juga memasang beberapa alat wifi di beberapa tempat strategis atau titik di dalam kota yaitu di

Hutan Kota Demma, di Gojeng, dan kita juga mendapat bantuan akses internet dari Kementerian Kominfo untuk 12 sekolah, 13 kantor desa, 7 puskesmas dan 4 kantor camat. Sebelumnya antrian banyak di Diskominfo budpar terutama saat PUPNS dan setelah titik-titik baru ini sudah tidak seperti tahun sebelumnya sudah dipenuhi juga oleh masyarakat siang malam, dan kita sudah meminta agar titik baru akses internet ini tidak boleh mematikan jaringannya.” (Wawancara pada 11 Mei 2016)

Selain penyediaan fasilitas-fasilitas akses internet tersebut dan juga layanan-layanan e-government lainnya, penyediaan sarana dan prasarana LPSE untuk lelang online telah diusahakan dengan maksimal. Ihsan mengatakan,

“Secara garis besar infrastruktur untuk LPSE khususnya LPSE Sinjai sudah sangat memungkinkan untuk menjalankan pengadaan barang/jasa secara elektronik. LPSE sinjai memiliki ruang *bidding* yang dilengkapi dengan komputer serta printer dengan jaringan internet yg cukup memadai . Sudah cukup memadai bagi panitia maupun penyedia yg ingin melakukan *bidding* namun kami belum memiliki ruang khusus untuk penempatan *server* serta ruang *helpdesk* dan ruang pelatihan ”. (Wawancara pada 11 Mei 2016)

Penyediaan media online di Sinjai tidak hanya oleh pemerintah saja, perorangan dan swasta pun bisa mengelola media online. Supardi mengatakan :

“Ada beberapa *provider* lain dari luar. seperti www.sinjai.info dan beberapa media online yang dikelola secara mandiri oleh penyedia berita independen. dan semua menyampaikan ke dinas kominfo. Badan Pengelola Keuangan juga sudah terkoneksi langsung dengan BPK.” (Wawancara pada 11 Mei 2016)

Fasilitas akses internet gratis yang tersedia di banyak titik di Sinjai tentu digunakan dengan baik seperti penjelasan diatas

terutama saat tertentu misalnya PUPNS dan saat lelang yang membuat jumlah penggunanya menjadi banyak. Ketersediaan media-media online juga yang berisi informasi yang siap untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Ketersediaan fasilitas akses internet yang memadai untuk pengguna berdampak pula pada perkembangan dari paket yang diumumkan pada media LPSE oleh pokja ULP. Mereka akan melakukan pembukaan penawaran dan semua jenis tugas dari pokja hingga ada pemenang. Rafiuddin mengatakan :

“Kebetulan aplikasi pengadaan elektronik ini sudah berbasis web dan internet jadi kita dengan mudah dapat mengakses kapan pun dan dimana pun kita berada, jadi kami selaku pokja itu mengumumkan di instansi terkait yaitu di Dinas ESDM dan tahap selanjutnya kita tinggal mengamati melalui smartphone yg terkoneksi ke internet”. (Wawancara pada 11 Mei 2016)

Sebagaimana dikatakan juga oleh Ketua ULP, Arifuddin :

“Jadi pada prinsipnya pokja ULP bekerja berkelompok boleh dimana saja sesuai yang disepakati dan mengakses ke LPSE dimana saja sepanjang ada internet”. (Wawancara pada 11 Mei 2016)

d. Memudahkan pelayanan

Lelang proyek PLTS di Kecamatan Pulau Sembilan dilakukan melalui media online bisa dilihat jika melakukan pencarian di website Pemkab Sinjai dan juga di aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan kata kunci “PLTS”. Rafiuddin mengatakan :

“Khusus mengenai website resmi Pemkab Sinjai hanya sebatas mengumumkan paket-paket saja yang telah lelang di kab. sinjai tetapi untuk prosesnya dilakukan melalui aplikasi Ipse.” (Wawancara pada 11 Mei 2016)

Pemanfaatan media online selain SPSE untuk keperluan lelang dijelaskan oleh Ihsan bahwa semua proses lelang hanya menggunakan media yang disediakan oleh LPSE Sinjai sedangkan media lain seperti website Sinjai dipakai untuk memberikan pengumuman lelang dan juga informasi saat lelang telah berakhir serta informasi-informasi lain berkaitan dengan lelang tersebut.

Ihsan mengatakan :

“Untuk media lain biasanya hanya untuk pengumuman dan hasil tender. Selain itu semua Rencana Umum Pengadaan juga kita menyediakan tautan pada web sinjai ke situsnya di LKPP”. (Wawancara pada 11 Mei 2016)

Demikian juga yang dikatakan oleh Arifuddin, ketua ULP Sinjai :

“Jadi sejak 2012 pengadaan barang jasa sudah pakai LPSE sudah tidak ada media lainnya”. (Wawancara pada 11 Mei 2016)

The screenshot shows a web interface with a sidebar on the left and a main content area on the right. The sidebar contains a calendar for July with dates 'Jumat, 1 Juli' and 'Sabtu, 2 Juli', and a 'Google Kalender' button. Below the calendar is a section titled 'Regulasi Daerah' (Local Regulations) with a sub-section 'Peraturan Daerah' (Local Regulations) listing years from 2005 to 2015. The main content area has a 'Display #' dropdown set to '20'. It features three news items:

- Wagub Sulsel Resmikan Proyek Pembangunan Sinjai**: Created on 27 February 2016. Posted in Berita. The text mentions the expansion of the office building of the Sinjai District Office and the inauguration of PLTS projects in Pulau Liang-Liang and Pulau Harapan.
- Kegiatan 2015 - Sekretariat Daerah**: Created on 17 December 2015. Posted in Kantor. The text mentions the inauguration of PLTS projects in Pulau Sembilan.
- Kegiatan 2015 - Dinas ESDM**: Created on 24 November 2015. Posted in Dinas. The text mentions the inauguration of PLTS projects in Pulau Sembilan by the District Regent and the District Energy and Mineral Resources Office.

Gambar 4.7. Hasil Pencarian PLTS di situs resmi sinjai

Hubungan antara website Sinjai dan sistem dari LPSE dijelaskan oleh penanggung jawabnya, Haryanti Arif yang mengatakan :

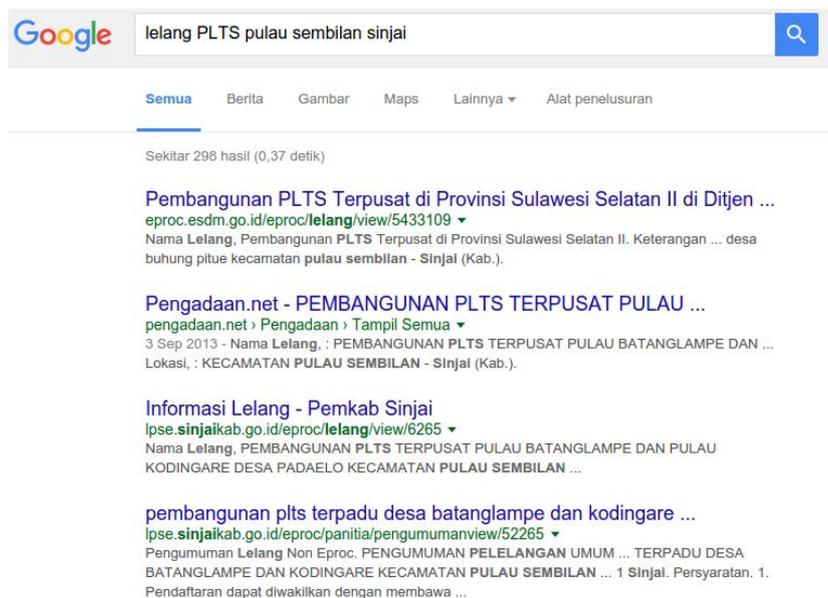
“LPSE sudah otomatis masuk ke website, ada juga sistem Rencana Umum Pengadaan di website sinjai untuk melihat semua rencana pengadaan pada tahun tertentu dari semua SKPD, tautan menuju LPSE tersedia di website”. (Wawancara pada 20 Mei 2016)

Semua proses yang selain proses lelang bisa oleh media lain seperti website sinjai. Media sosial pun dimanfaatkan oleh anggota ULP untuk memberikan informasi lebih luas mengenai pengumuman proyek.

Hertasning mengatakan,

“Selain lpse, pokja juga biasa menggunakan facebook pribadi atau BBM. Kita menginformasikan ke teman-teman untuk ikut tender. Ada juga pengumuman yang kita pasang di kantor”. (Wawancara pada 19 Mei 2016)

Bahkan saat melakukan pencarian menggunakan mesin pencari seperti google.com akan tampak hasilnya seperti berikut ini.



Gambar 4.8 Hasil Pencarian di mesin pencari google

Tampak pada gambar 4.8. informasi tentang lelang PLTS ada *url* yang menuju ke situs pengadaan kementerian ESDM dan juga ke situs LPSE Sinjai.

LPSE ini memungkinkan semua jenis pekerjaan pengadaan yang dipasang akan mudah untuk diikuti oleh para penyedia yang terdaftar sebagai pengguna LPSE di Indonesia dan juga akan meminimalisir penggunaan kertas dan biaya lain jika dibandingkan dengan sistem pengadaan manual. Ihsan menjelaskan,

“Manfaat yang terasa adalah adanya efisiensi anggaran karena sistem ini meminimalisir penggunaan kertas serta mengurangi biaya² yang dikeluarkan bila tidak menggunakan sistem SPSE. Sebelum adanya sistem ini setiap tahapan lelang harus dilalui dengan adanya pertemuan antara penyedia dengan panitia

dimana akan sangat menyita waktu dan tempat belum lagi biaya konsumsi akibat pertemuan itu . Dengan sistem online meminimalkan kontak antara panitia dengan penyedia sehingga panitia akan lebih independen dan penyedia pun tidak dapat mengintimidasi penyedia selain itu dengan sistem ini seluruh penyedia yang berkompeten di seluruh Indonesia akan mampu untuk mengikuti lelang”. (Wawancara pada 11 Mei 2016)

Menjadi penyedia yang terdaftar di LPSE ini cukup mudah karena hanya perlu mendaftar melalui situs LPSE untuk kemudian datang ke kantor LPSE membawa berkas asli untuk proses verifikasi. Setelah dinyatakan lolos verifikasi maka akun sebagai penyedia akan aktif dan pemberitahuan dikirim ke penyedia tersebut melalui email secara otomatis oleh sistem.

Penyedia yang telah terdaftar akan selalu mendapatkan info-info proyek yang diinginkannya yang sesuai dengan kualifikasinya.

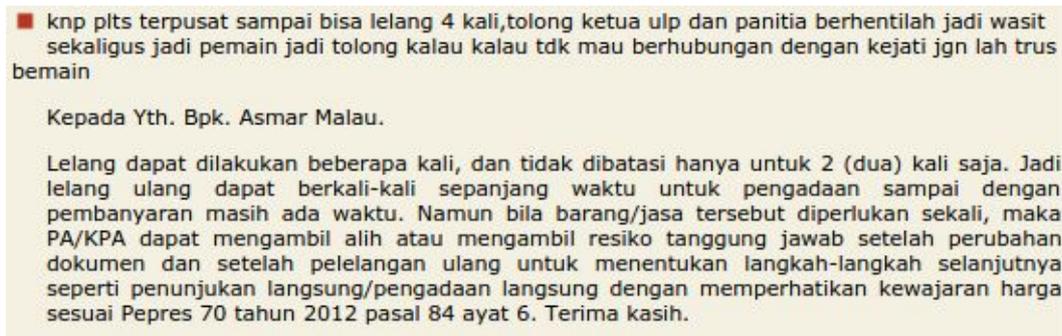
Andi Toto, Direktur CV. Hasta Teknik mengatakan :

“Saya memperoleh informasi tender/lelang dari LPSE sebagai lembaga pemerintah yg menyediakan wadah proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Dan sebagai pengusaha selalu mencari informasi tender secara online ke seluruh lpse se-Indonesia.” (Wawancara pada 28 Juni 2016).

e. Interaktifitas

Penyedia, Auditor dan LSM bisa berinteraksi dengan pokja ULP melalui sistem SPSE. Begitu pula dengan PPK. Pihak penyedia media online dari tim website Sinjai dan LPSE telah menyediakan fitur pada website untuk melakukan interaksi ini serta penyediaan *helpdesk* di LPSE. Ihsan mengatakan,

“Sistem SPSE menyediakan helpdesk, ada bagian tanya jawab, jadi bagi masyarakat bisa mengajukan pertanyaan melalui sistem itu. nanti ada tim helpdesk yang akan menjawab dan menyeleksi sesuai aturan yang ada”. (Wawancara pada 11 Mei 2016)



Gambar 4.9. Halaman Tanya Jawab di SPSE Sinjai tentang lelang ulang PLTS terpusat

Interaksi antara pokja dan penyedia dilakukan melalui fitur *chatting* saat jadwal penjelasan lelang maupun saat proses sanggahan.

Andi Toto mengatakan,

“Iya kami biasa melakukan protes/sanggahan tender bila kami merasa dirugikan oleh pokja, protes itu kami lakukan lewat sistem yang tersedia di portal LPSE.” (Wawancara pada 28 Juni 2016)

Interaksi ini juga ditegaskan oleh Ihsan dengan mengatakan,

“Ya jadi setiap tahapan lelang ada waktunya, jadi saat pemasukan berkas maka penyedia hanya bisa melakukan pemasukan berkas dan belum bisa bertanya, jika sudah saatnya *anwizing* atau penjelasan lelang maka penyedia sudah bisa melakukan pertanyaan atau diskusi dan ini dibatasi oleh waktu, proses interaksi seperti *chatting*, begitu juga pada saat tahapan sanggahan semua dilakukan pada sistem.” (Wawancara pada 11 Mei 2016)

Interaksi antara penyedia dan tim pokja ini tidak bisa dilihat langsung oleh publik seperti gambar 4.6. di atas, sebagaimana

dijelaskan oleh Ihsan saat ditanya tentang bagaimana panitia berkomunikasi pada awalnya dengan menggunakan email yang dikirim dari sistem,

“Semua proses sudah elektronik, dari awal hingga akhir. setiap ada pemberitahuan selalu dikirim mmelalui email yang terdaftar di sistem” (Wawancara pada 11 Mei 2016)

f. Big Data

Kemampuan menyimpan dan menampilkan data dalam jumlah besar, Semua data-data lelang bertahun-tahun kini tersedia sebagai data digital terbuka (open data) dan dengan mudah dapat diakses di internet.

Informasi pelaksanaan lelang PLTS di Pulau Sembilan ini bisa diakses sejak dilaksanakan pada tahun 2013 hingga 2016. Tim Pokja menerima data dari para penyedia berupa berkas digital yang diunggah ke server LPSE untuk selanjutnya dilakukan evaluasi penawaran hingga tahap penentuan pemenang. Suharman mengatakan,

“Jadi khusus plts, tendernya dimulai dari pengumuman, sesuai aturan Perpres, pengumuman lewat LPSE, masyarakat dan badan usaha yang melihat bisa mengajukan penawaran hingga pemasukan berkas dan pemenangan.”

Big Data dengan kemampuan *memory* penyimpanan yang besar memang dipersiapkan untuk sebuah media online. Pendaftar lelang yang terbuka untuk seluruh nusantara tentu membutuhkan tempat data dan kecepatan akses yang besar. Hertasning mengatakan,

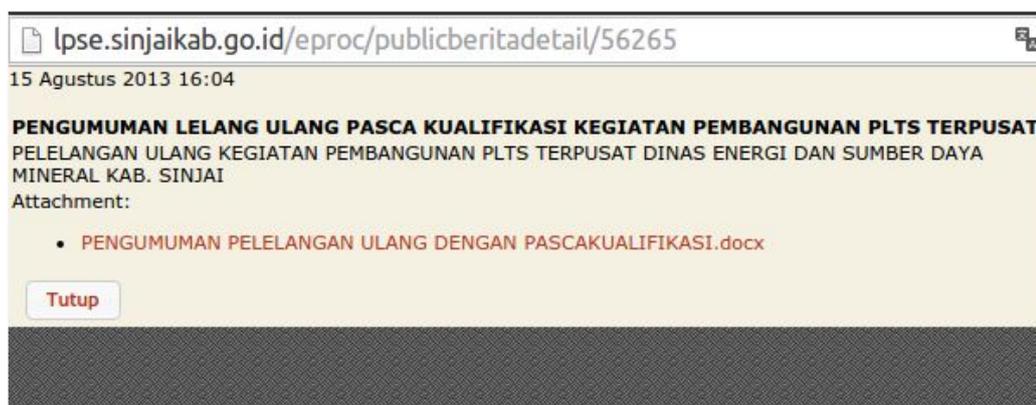
“Untuk cara kerja proses tender PLTS di LPSE ini saya melihat sangat bagus mengingat dari rekanan yang mendaftar itu saya berkesimpulan seluruh nusantara ikut mendaftar, dari Sumatera, Jakarta, Kalimantan, Sulawesi termasuk Sinjai. “

Kemampuan big data inilah yang menjadi salah satu sebab di media online itu disediakan fasilitas pencarian. Termasuk di LPSE Sinjai fasilitas ini ada dan kita bisa membuka semua data-data lelang terdahulu yang sudah selesai maupun yang sedang berlangsung.

Kapasitas penyimpanan yang besar ini telah dipersiapkan untuk menggantikan fungsi kertas sehingga semua dokumen akan terarsipkan secara elektronik. Hal ini telah dijelaskan oleh Ihsan bahwa sistem ini meminimalisir penggunaan kertas serta mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan.

g. Komprehensif

Komprehensif yang berarti semua data dan informasi yang tersedia selalu disertai dengan pelengkap seperti berkas pendukung, gambar, suara ataupun video.



Gambar 4.11. Pengumuman Lelang Ulang PLTS

Gambar 4.11. di atas memperlihatkan sebuah informasi lelang yang lengkap dengan lampiran berkas pendukungnya. Situs sinjaikab.go.id pun selalu menampilkan berkas pendukung pada informasi yang berkaitan dengan PLTS. Tapi saat peneliti membuka berita tentang peresmian PLTS, lampiran gambarnya mengalami masalah tidak bisa diakses walaupun sudah diselipkan diantara tulisan yang ada

4.3. Bentuk Transparansi Dalam Proses Lelang Melalui Media Online

Proses lelang yang telah dilakukan secara elektronik dan bisa dimonitor secara terbuka melalui internet ternyata masih belum memuaskan banyak pihak. Terutama mengenai informasi yang ada antara proses pengumuman pelaksanaan dan pengumuman pemenang. Syarifuddin mengatakan,

“Ya, memang untuk saat ini tidak semua LSM atau masyarakat bisa melihat secara keseluruhan khususnya di ranah panitia. kita hanya mengumukan hasil, prosesnya tidak.”

Kopel Sinjai yang kadang melakukan penelitian sering mencari informasi melalui website Sinjai terutama data yang berhubungan dengan APBD dan pengadaan. Musaddaq mengatakan,

“Sebenarnya itu yang saya katakan dari awal, jika kita bicara ideal maka semua informasi publik seharusnya ada dalam website pemerintah. Saya pernah melakukan penelitian dan salah satu sumber saya itu di website pemkab Sinjai tapi data yang ada masih sangat standar. Website itu belum menampilkan informasi-infirmasi publik seperti APBD dan informasi lainnya.

Jika LPSE sudah ada gambaran umum tapi proses lainnya belum bisa diakses. Website sinjai belum terlalu membantu.”

Informasi yang diberikan oleh sistem SPSE pun masih dianggap belum cukup oleh LSM. Musaddaq mengatakan :

“Saya juga lagi riset sederhana tentang transparansi khususnya tender elektronik ini. walaupun sebenarnya pemerintah daerah sudah berinovasi terhadap tender elektronik melalui LPSE, lagi-lagi saya katakan bahwa masih banyak hal yang perlu diketahui publik belum ter-cover dalam LPSE. Saya contohkan data-data seperti *summary report*, berita acara lelang dan data sanggahan lelang itu belum kita dapat datanya dari LPSE itu. masih standar sekali lpse ini walupun Pemkab sudah membanggakan bahwa lpse ini terbuka.” (Wawancara, 17 Mei 2016)

Andi Muallim sebagai auditor inspektorat Sinjai telah mengatakan bahwa proses evaluasi dan lainnya antara pengumuman lelang dan pengumuman pemenang masih tertutup. Tapi auditor bisa melakukan evaluasi tersebut dengan meminta akun sebagai auditor ke LPSE Sinjai. Admin LPSE, Ihsan mengatakan :

“Hingga saat ini SPSE masih seperti itu, untuk proses tender hanya bisa diketahui panitia yang menangani dan penyedia yang ikut. Yang bisa melihat prosesnya hanya auditor jika telah memiliki akun untuk masuk ke sistem. Masyarakat umum hanya bisa melihat tahapan proyek dan hasil akhir, sedangkan proses lain di dalamnya tidak bisa dilihat” (Wawancara, 11 Mei 2016).

Ihsan menegaskan apa yang telah dikatakan oleh LSM dengan mengatakan,

“Untuk proses tender hanya bisa diketahui panitia yang menangani dan penyedia yang ikut. Serta juga oleh auditor yang punya akun. Masyarakat umum hanya bisa melihat tahapan proyek dan hasil akhir, sedangkan proses lain di dalamnya tidak bisa melihat.” (Wawancara, 11 Mei 2016).

4.4. Faktor Pendorong dan Penghambat

a. Faktor Legalitas

Pembentukan LPSE di Kabupaten Sinjai untuk mendukung proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah telah dimulai sejak tahun 2011. Hal ini bisa kita lihat dari Peraturan Bupati (Perbup) No. 4 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Perbup ini terpasang pada tautan regulasi di situs LPSE Sinjai (<http://lpse.sinjaikab.go.id/eproc/regulasi>). Ihsan selaku Admin LPSE Sinjai mengatakan,

“Hal itu merupakan amanat dari perpres 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah yg terakhir perubahan ke empat tahun 2015 dimana dalam perpres itu diatur tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan perbup sinjai nomor 11 tahun 2011 ttg pembentukan LPSE.” (Wawancara pada 11 Mei 2016)

Perbup tersebut dibuat dengan pertimbangan bahwa untuk efisiensi, efektifitas, dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Sinjai. Isi selanjutnya menjelaskan bentuk dari LPSE Sinjai yang berupa kepanitiaan (Ad-Hoc) dan bekedudukan di Badan Komunikasi dan Informatika yang sekarang telah berubah menjadi Dinas Komunikasi Informatika Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Sinjai. Sebagai LPSE Ad-Hoc, kepanitiannya ditunjuk melalui Surat Keputusan (SK) Bupati yang terus diperbaharui setiap tahun.

Perpres 54 tahun 2010 telah punya turunan dan yang terbaru saat ini adalah Perpres No. 4 Tahun 2015. Walaupun telah ada turunan terbaru tapi Perbup Sinjai tentang LPSE tahun 2011 masih tetap menjadi dasar operasional tim LPSE di Kabupaten Sinjai dalam pembentukan SK-nya.

b. Faktor Sumber Daya Manusia

Sejak dibentuknya tim LPSE pada tahun 2011, telah banyak persiapan-persiapan yang dilakukan terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksananya proses tender secara elektronik dan online. Selain dukungan pemerintah berupa regulasi, ketersediaan sumber daya manusia yang akan menjalankan LPSE ini sangat diperlukan. Pelatihan-pelatihan sebagai ketua, admin, helpdesk telah dilaksanakan beberapa kali dengan datang langsung ke kantor (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) LKPP di Jakarta. Infrastruktur Teknologi Informasi juga menjadi hal yang diutamakan terutama untuk memasang aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

c. Faktor Infrastruktur

Kebutuhan akan listrik berpengaruh pada masyarakat Pulau Sembilan dengan penggunaan media ini terutama pada penggunaan internet di ponsel cerdas mereka. Walaupun ada

pengguna ponsel tapi rata-rata masyarakat menggunakannya untuk mendengarkan musik. Asiswanto mengatakan,

“jadi siang seperti ini hanya pake baterai untuk dengar musik. biasanya yang pake hape itu pake memori untuk memutar musik”. (Wawancara, 15 Mei 2016).

Ada yang menggunakan internet di ponsel dan laptop tapi terbatas pada guru-guru dan siswa yang sudah mengenal teknologi.

Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa Persatuan,

“Pengguna ponsel dan laptop rata-rata pakai internet, mereka ini anak-anak sekolah dan guru-guru. Mereka membuka web dan facebook.” (Wawancara, 20 Mei 2016).

Penggunaan laptop dan ponsel pun sangat terbatas karena perlu listrik untuk pengisian baterai. Kepala Desa Padaelo malah mengatakan,

“Bahkan jika PLTS menyala pun listrik hanya untuk penerangan dan cas hape, untuk kipas angin sudah tidak bisa.” (Wawancara, 20 Mei 2016).

Masyarakat yang akan menikmati PLTS dari pengadaan ini tidak mendapatkan informasi dari media online tapi melalui informasi oleh pejabat struktural pemerintah yaitu Dinas ESDM Sinjai dan juga dari Kepala Desa. Secara umum informasi tentang PLTS ini sudah diusulkan melalui musrenbang kecamatan dan juga pengusulan langsung ke instansi terkait. Camat Pulau Sembilan mengatakan :

“Pengusulan plts itu kita masukkan di Musrenbang kadang juga kita langsung konsultasi Dinas ESDM dengan bentuk rapat masyarakat dan kebutuhan masyarakat dan disodorkan

ke Dinas ESDM. Jadi setelah kita mengusulkan, kapan saja kita ketemu kepala esdm selalu kita sampaikan, itu kordinasi yang selalu kita perlançar” (Wawancara, 21 Mei 2016).

Proses pengadaan PLTS itu sendiri diperhatikan oleh masyarakat, tapi mereka tidak mencari informasinya melalui media.

Tahang, Kepala Dusun Kanalo 2 mengatakan,

“Kita tidak pernah cari info tentang PLTS, nanti datang di sini baru ditahu, info ini kami tahu dari pak desa” (Wawancara, 25 Mei 2016).

Begitu juga dikatakan oleh Fajar selaku Kepala Dusun Batanglampe 1 bahwa masyarakat hanya tahu PLTS ini begitu sudah datang ke pulau. Namun ada juga yang tahu karena ikut terlibat dalam pembuatan pondasinya seperti dikatakan oleh pak Asiswanto,

“Saya tahu PLTS disini dan saya sudah tahu dari kepala desa. Saya yang tunjukkan juga tempatnya untuk pembangunan. Anggarannya saya tidak tahu. Saya yang kerja pondasinya saya dikasi 7 juta.” (Wawancara, 25 Mei 2016)

Kendala lain yang ada dengan proses lelang PLTS online ini adalah ketersediaan ruangan untuk penempatan server. Ihsan mengatakan,

“LPSE cukup memadai bagi panitia maupun penyedia yg ingin menggunakan bidding namun kami belum memiliki ruang khusus untuk penempatan server serta ruang *helpdesk* dan ruang pelatihan terkait dengan RUP (rencana umum pengadaan)”.

Arifuddin yang telah menggunakan LPSE ini sejak diberlakukan pada tahun 2012 menambahkan,

“jadi menurut pendapat saya, pelaksanaan melalui media online LPSE sudah berfungsi dengan baik sejak 2012 namun sarana dan prasarana untuk online perlu ditingkatkan lagi.

d. Faktor Intervensi

Adapun adanya lelang yang diulang bukan karena informasi yang tidak sampai kepada penyedia atau ada proses yang salah tapi karena belum adanya penyedia yang memenuhi syarat sebagai pemenang lelang. Selain itu juga seringnya ada tekanan-tekanan yang diterima oleh Pokja ULP. Hertasning mengatakan,

“Ada yang bermasalah dan ada yang diulang karena PLTS ini banyak peminatnya dari seluruh Indonesia namun dari proses tendernya banyak perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan tersebut sehingga kami terus mengulang tender. Yang kedua banyak menyita waktu karena sangat rumit karena harus banyak dukungan pabrikan untuk rekomendasi, dan PLTS ini banyak yang memakai bendera saja tanpa melibatkan pengurus perusahaan tersebut hingga tender tersebut sering diulang karena banyak klaim perusahaan dengan peminjaman perusahaan tersebut sehingga kami dari pokja sering kebingungan kenapa bukan dari direktur langsung yang menghubungi anggota pokja untuk melakukan tender. Tender PLTS Pulau Sembilan ini sangat kompleks karena banyak mafia-mafia atau oknum tertentu yang menghalalkan segala cara untuk mempengaruhi anggota pokja supaya perusahaannya dimenangkan sehingga kami dari anggota pokja berkesimpulan bahwa persoalan ini tidak bisa diberikan untuk melaksanakan proyek tersebut. Jadi tender plts ini sangat kompleks karena di dalamnya sangat terkait dengan kebijakan-kebijakan sehingga kami dari pokja kadang mendapat tekanan sehingga tidak bekerja profesional jadi kami berkesimpulan bahwa yang kami harus lakukan adalah bekerja sesuai prosedur dan mekanisme proses tender dan hal ini kadang kita sudah memeriksa tapi kita harus melakukan lelang ulang.”

Lelang yang diulang ini sudah dijelaskan oleh jawab pada gambar 4.10. Adapun jawab secara umum tentang kenapa ada lelang yang bisa diulang bisa juga dilihat dari halaman tanya jawab di media SPSE berikut ini,

- 1. Kenapa pelelangan di sinjai selalu di ulang2, se olah2 ada titipan,,,,,2. Kenapa panitia selalu mempersulit peserta lelang dengan menambah persyaratan SKA/SKT yg sulit di dapat, inikah strategi
1. Lelang dapat dilakukan beberapa kali, dan tidak dibatasi hanya untuk 2 (dua) kali saja. Jadi lelang ulang dapat berkali-kali sepanjang waktu untuk pengadaan sampai dengan pembayaran masih ada waktu. Namun bila barang/jasa tersebut diperlukan sekali, maka PA/KPA dapat mengambil alih atau mengambil resiko tanggung jawab setelah perubahan dokumen dan setelah pelelangan ulang untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya seperti penunjukan langsung/pengadaan langsung dengan memperhatikan kewajaran harga sesuai Pepres 70 tahun 2012 pasal 84 ayat 6.
 2. Dalam hal penyusunan dokumen lelang yang memuat tentang persyaratan lelang merupakan kapasitas dan kewenangan pokja ULP dan PPK (PPK dan Pokja ULP bersama-sama menyusun persyaratan lelang), persyaratan lelang terutama SKA dan SKT haruslah sesuai dengan pekerjaan yang akan dilelang dan tetap mengacu pada peraturan jasa konstruksi, kalaupun saudara menganggap bahwa persyaratan tersebut berlebihan maka saudara dapat

Gambar 4.12. Alasan Lelang diulang

Pekerjaan pokja PLTS yang online ternyata juga mendapat intervensi atau tekanan secara *offline*, Hertasning lebih lengkap menjelaskan,

“selama ini selain *online* ... *offline* juga kami diintervensi, bukan hanya dalam hal intervensi dari pimpinan bahkan kadang kala juga melibatkan preman-preman yg mmemberikan ancaman atau semacam tekanan-tekanan terhadap kami selaku anggota pokja untuk dimenangkan dalam hal proses tender. inilah yang mempengaruhi proses profesionalisme kami utk melaksanakan pelelangan di Kabupaten Sinjai.”

Terkait dengan intervensi ini juga ditambahkan oleh Musaddaq saat ditanya tentang lelang di Sinjai sudah transparan atau belum, beliau menjelaskan

“ya, sebenarnya yang kita harapkan seperti itu, kalaupun memang mekanismenya sudah transparan dan mengurangi permainan antara panitia dan rekanan tetapi saya kira masih banyak kekurangan dalam prosesnya karena masih ada juga

campur tangan. Contoh di Surabaya sudah tidak ada tatap muka tapi kita disini masih ada permainan-permainan antara pantia dan pengusaha. Saya teringat tahun lalu banyak panitia yang minta mengundurkan diri karena ada intervensi dari dprd karena disinyalir ada permainan. Jadi menurut saya walaupun sudah elektronik tapi kenyataannya masih banyak yang ditutupi oleh pemerintah hingga banyak yang menimbulkan gejala-gejala.”

Hasil pengamatan di atas dikumpulkan dalam matriks wawancara sebagai berikut,

No.	Kategori	Hasil wawancara
1.	Penggunaan Media Online dalam proses lelang PLTS Pulau Sembilan	<p>- Data Terbuka / Transparansi Semua informan rata-rata mengatakan bahwa transparansi telah dihasilkan dengan penggunaan media online ini yaitu website resmi Sinjai dengan data umum yang disediakan serta website LPSE yang khusus tentang lelang online. Kecuali oleh Kopel yang masih mempertanyakan proses lelang antara pengumuman lelang dan penentuan pemenang yang masih tertutup.</p> <p>- Akurat/Akuntabel Data yang disediakan oleh media online ini mengikuti aturan yang berlaku, Informan dari pokja dan auditor telah mempertegas dengan ketersediaan informasi yang sesuai aturan pemerintah dan prosedur operasional standar yang berlaku.</p> <p>- Aksesibilitas Semua informan setuju dengan kemudahan dan kecepatan akses yang diberikan oleh media online ini. Kecuali informan dari masyarakat pulau sembilan yang terkendala dengan listrik untuk mengakses</p>

		<p>internet sehingga informasi yang mereka dapatkan secara langsung dari pihak yang berkepentingan dengan lelang PLTS.</p> <p>- Kemudahan pelayanan Para informan merasa sangat dimudahkan dengan pelayanan informasi dengan hanya mengakses dan kemudian melakukan interaksi melalui sistem online yang tersedia.</p> <p>- Interaktifitas Informan mengatakan bahwa interaksi terjadi dengan proses chatting dan juga menggunakan <i>email</i>. Situs <i>web</i> yang tersedia menyediakan juga <i>form</i> fasilitas interaksi ini untuk setiap pertanyaan dan keluhan. LPSE malah menyediakan <i>helpdesk</i> khusus untuk menjawab.</p> <p>- Big Data Peneliti melihat bahwa semua data lelang tersimpan dengan struktur dan arsip yang bagus sehingga mudah untuk diakses kembali.</p> <p>- Komprehensif Peneliti mendapatkan bahwa data-data yang ada selalu disertai berkas pendukung yang menguatkan.</p>
2.	Bentuk Transparansi yang diciptakan	Penyajian data dan proses lelang yang menggunakan website Sinjai dan LPSE Sinjai oleh informan dari Kopel dan Auditor dianggap belum transparan, terutama dengan penyediaan dokumen-dokumen terkait penganggaran dan juga proses lelang antara pengumuman lelang dan penetapan pemenang lelang.

3.	Faktor yang mempengaruhi lelang PLTS	<p>- Faktor legalitas Ada aturan dari pemerintah tentang lelang online yang diturunkan menjadi perbup dan diaplikasikan menjadi SK kegiatan LPSE serta SK Pokja ULP untuk lelang berdasarkan instansi. Lelang PLTS ini mengambil pokja untuk instansi Dinas ESDM Sinjai.</p> <p>- Faktor Sumber Daya Manusia Tim LPSE telah mengikuti bimbingan teknis pelayanan dari LKPP. Tim ini yang kemudian melatih Pokja ULP dalam melakukan proses lelang PLTS secara online.</p> <p>- Faktor Infrastruktur Informan dari LPSE, ULP dan Penyedia masih merasa kurang dengan infrastruktur yang ada. Ketersediaan ruang server yang belum memadai dan gangguan jaringan masih sering dirasakan. Informan dari pokja sendiri menyarankan agar sarana dan prasarana semakin ditingkatkan.</p> <p>- Faktor intervensi Adanya intervensi dari pihak-pihak yang ingin dimenangkan dalam lelang PLTS ini.</p>
----	--------------------------------------	--

Tabel 4.2. Matriks hasil wawancara

B. Pembahasan

Peneliti menguji penerapan ciri-ciri media online sebagai media baru yang menjadi penanda mulainya periode baru dimana teknologi interaktif dan komunikasi jaringan, khususnya dunia maya akan mengubah masyarakat. (Littlejohn dan Foss, 2014:413).

1. Penggunaan Media Online dalam proses lelang PLTS Pulau Sembilan

New Media merupakan media yang menggunakan internet, media online berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, berpotensi interaktif dan dapat berfungsi secara privat maupun secara public (Mondry, 2008: 13).

Pemerintah Kabupaten Sinjai telah menyediakan infrastruktur yang memadai untuk mengakses internet dengan beberapa titik wifi hotspot seperti di Gojeng, Hutan Kota Demma, kantor Dinas Kominfo dan lapangan nasional. Pertumbuhan kafe-kafe yang menyediakan akses internet gratis juga semakin banyak.

Penyiapan infrastruktur bukan hanya dalam hal mengakses dan menggunakan internet tapi dalam penyediaan konten dan aplikasi yang membantu tugas-tugas pemerintahan berbasis elektronik.

Komponen dari new media terdiri dari 3 unsur yaitu pembuat, penyalur dan pemakai dari new media itu sendiri. Pemkab Sinjai telah

memanfaatkan internet untuk menyediakan media yang bisa menjadi tempat interaksi antara pemerintah dan masyarakat secara umum.

Pemerintah Kabupaten Sinjai telah menjadi unsur pembuat informasi sebagai komunikator menyampaikan pesan pembangunan pada masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika yang menjadi pelaksana tugas kemudian menyediakan sebuah media online yang akan menjadi saluran pesan-pesan yang akan disampaikan dan adanya pengguna informasi atau komunikan yang kemudian bisa mengakses media tersebut sesuai dengan kebutuhannya.

Website Sinjai yang telah ada sejak berlakunya Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang e-government telah berusaha menyediakan berbagai informasi dari pemerintah yang bersifat terbuka kepada masyarakat.

Proses lelang online melalui Perpres No. 54 tahun 2010 pun dijadikan acuan dalam penyusunan Perbup tentang LPSE dan menjadi dasar terbentuknya tim LPSE dan penyediaan infrastrukturnya.

Karakteristik dari new media dengan penggunaan media online ini antara lain :

- a. Digital, website Sinjai bisa diakses melalui semua perangkat digital yang tersedia yang terkoneksi dengan internet. Aplikasi SPSE sebagai media informasi lelang dan penyedia sarana lelang online telah bisa diakses dan dimanfaatkan oleh Pokja ULP dan Penyedia untuk pelaksanaan lelang.

- b. Interaktifitas, ada interaksi / *feedback* antara penyedia informasi dan penerima informasi. Proses komunikasi terjadi dengan lancar. Website Sinjai menyediakan tempat untuk melakukan diskusi tentang suatu permasalahan yang ada pada masyarakat dan pemerintah bisa memberikan jawaban. Proses lelang online pun seperti itu, ada interaksi antara pokja dan penyedia. Proses penjelasan lelang dan sanggahan dilakukan melalui chatting menggunakan aplikasi.
- c. Hypertextual, dengan perkembangan teknologi hingga saat ini kita kenal dengan HTML 5 yang membuat halaman website menjadi semakin mudah untuk dibuat. Website Sinjai dan Aplikasi e-governmetn di Sinjai telah dibuat berbasis web sehingga semua perintah cukup dengan klik yang akan membuka informasi lain di dalamnya. Karakteristik ini juga menjadikan media ini menjadi tempat dengan banyak data yang saling terhubung. (*big data*)
- d. Dispersal, dimana produksi, distribusi dan konsumsi tidak terpusat. Penyedia, Pokja, Masyarakat bisa menjadi produsen, distributor dan pengguna informasi. Inilah yang dinilai new media merupakan media yang lebih bersifat pribadi (*individually*). Semua informasi yang ada pada media online akan sampai pada setiap individu yang memerlukan informasi tersebut.
- e. Virtuality, melakukan interaksi dengan orang lain menggunakan aplikasi dan perangkat teknologi yang ada digengaman. Pokja

lelang menyediakan informasi dan penyedia serta masyarakat bisa menggunakan informasi tersebut hanya dengan mengakses dari PC ataupun ponsel cerdas. Kehadiran seseorang secara fisik tidak ada namun semua bertemu di dunia maya.

Teori Uses and Gratifications (kegunaan dan kepuasan) menunjukkan bahwa yang menjadi permasalahan utama adalah bagaimana media memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial khalayak yang menjadi pengguna media. Inti kajiannya adalah pada khalayak yang aktif yang sengaja memilih dan menggunakan media untuk mencapai tujuan khusus, yaitu pemuas kebutuhan hidupnya. (Effendy, 1990:20).

Denis McQuail mengemukakan kemungkinan penggunaan media dan jenis-jenis motif gratifikasi oleh individu dengan membedakan menjadi empat bagian. Dalam penelitian ini, kategori motif mengakses media online penyedia informasi lelang yang dijadikan acuan adalah kategori motif mengkonsumsi media menurut McQuail (1983) yaitu 1. Motif Gratifikasi informasi yang berhubungan dengan semua informasi tentang lelang proyek. Dorongan mendapatkan pengetahuan dan terlibat aktif mengawasi. 2. Motif identitas personal, dorongan untuk memperkuat nilai-nilai pribadi, memperkuat kredibilitas, stabilitas dan status. 3. Motif gratifikasi dengan interaksi sosial berkaitan dengan interaksi orang untuk berinteraksi dengan orang lain, mempertahankan

norma-norma sosial dan menjalankan peran sosial. 4. Menyalurkan emosi dan bersifat menghibur.

Penyedia, Auditor, LSM dan pokja ULP adalah khalayak aktif yang menggunakan media sesuai dengan kebutuhan mereka akan informasi didasarkan dorongan mendapatkan pengetahuan dan terlibat aktif dalam mengawasi.

Teori information seeking, Donohew dan Tipton (1973), yang menjelaskan tentang pencarian, penghindaran, dan memproses informasi, disebut memiliki akar dari pemikiran psikologi sosial tentang kesesuaian sikap. Salah satu asumsi utamanya adalah bahwa orang cenderung untuk menghindari informasi yang tidak sesuai dengan *image of reality*-nya karena terasa membahayakan.

Dalam pandangan Dervin yang ditulis oleh Thomas (2004: 65) "*what people require when they find themselves stuck in an information gap is personalized information based on their interests, their views of the problem, and whatever barriers they expect to encounter*". Artinya : "Apa yang orang-orang perlukan ketika mereka menemukan diri mereka ditikam dalam sebuah pemisah informasi adalah menyelaraskan informasi berdasar pada minat mereka, pandangan mereka terhadap masalah, dan terhadap apapun rintangan-rintangan yang mereka harapkan bisa dihadapi".

Jadi yang dimaksud sebagai pencarian informasi adalah upaya seseorang untuk mengisi gap (kekosongan atau jarak) antara

ketidaktahuan dengan kenyataan yang terjadi jadi seseorang tersebut akan berusaha untuk memiliki pengetahuan tentang sesuatu fakta yang sebelumnya belum diketahuinya.

Masyarakat pulau sembilan yang ada dalam isolasi laut serta kesulitan dalam listrik, pencarian informasinya masih menunggu dari dinas atau instansi terkait serta dari pejabat desa yang ada disekitar mereka. Belum ada yang memanfaatkan media online yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Sinjai yang senantiasa memberikan informasi pembangunan dan kegiatan lelang walaupun kegiatan proyek itu berada disekitar mereka.

Berbeda dengan para informan dari Kopel, Inspektorat, Penyedia dan Pokja ULP yang telah diwawancarai. Mereka ini telah berusaha untuk mengisi kekosongan dari ketidaktahuan informasi dengan mengakses media online yang tersedia. Mereka memanfaatkan teknologi internet yang sudah semakin mudah untuk diakses dari berbagai macam perangkat untuk memenuhi kebutuhan mereka akan informasi yang ingin diketahuinya.

2. Bentuk Transparansi yang diciptakan

Penggunaan new media dalam memberikan informasi kepada publik didukung oleh semangat dari gerakan open government dan open data berdasarkan salah satu ciri dari media online yaitu bisa diakses dari mana saja dan adanya keterbukaan data. Ini bisa kita lihat

dengan semua hal yang berkaitan dengan lelang PLTS dari proses pengumuman hingga pemenang lelang bisa diakses melalui situs resmi pemkab Sinjai dan terutama secara khusus melalui situs LPSE Sinjai.

Penggunaan Media oleh penyedia konten dan pengelola media adalah berusaha menyajikan transparansi/keterbukaan data. Penyediaan media LPSE dan juga data-data dalam bentuk rencana umum pengadaan. Begitu pula semua informan dari pihak pemerintah terutama tim website dan pokja ULP telah menggunakan media online untuk menyediakan informasi sedangkan informan dari penyedia, LSM, auditor sangat aktif untuk menggunakan informasi tersebut. Mereka semua sangat aktif menggunakan media online sebagai tempat untuk berinteraksi dan memperoleh informasi.

Penyedia aktif membuka media online khususnya SPSE karena ada informasi lelang yang akan diikuti ataupun sedang proses sesuai jadwal yang terprogram oleh pokja ULP. LSM aktif menggunakan media online website Sinjai dan SPSE untuk melihat pengumuman lelang dan pencarian informasi yang berkaitan dengan pembangunan di Sinjai. Auditor juga menggunakan media SPSE untuk melakukan audit jika ada perintah pimpinan dan akan dibuatkan akun khusus untuk mengakses semua proses lelang dari awal hingga akhir.

Kepuasan yang dicari (*gratifikasi sought*) dengan penggunaan media oleh McQuail sesuai dengan motif masing-masing. Motif gratifikasi informasi yang menjadikan semua pihak yang punya

kepentingan terhadap informasi lelang akan berusaha memenuhi kepuasan akan informasi yang dicarinya.

Kopel sebagai LSM sudah aktif melakukan pemantauan proyek-proyek pemerintah Kab. Sinjai sejak tahun 2011 selalu berusaha memenuhi kebutuhan informasi akan lelang-lelang yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari perencanaan hingga perencanaan.

Motif lainnya yang bisa kita lihat dari Kopel, Auditor, Penyedia dan Pokja ULP ini adalah adalah motif identitas personal dan dorongan untuk memperkuat nilai-nilai pribadi, memperkuat kredibilitas, stabilitas dan status. Mereka semua mengakses informasi menyesuaikan dengan identitas masing-masing serta status yang disandangnya.

Adapun motif gratifikasi dengan interaksi sosial berkaitan dengan interaksi orang untuk berinteraksi dengan orang lain, mempertahankan norma-norma sosial dan menjalankan peran sosial. Penyedia, Auditor dan LSM berusaha untuk bisa berinteraksi dengan pokja ULP melalui sistem SPSE. Begitu pula dengan PPK. Pihak penyedia media online dari tim website Sinjai dan LPSE telah menyediakan fitur pada website untuk melakukan interaksi ini serta penyediaan *helpdesk* di LPSE.

Kepuasan yang diperoleh (*gratifikasi obtained*) para informan yang punya motif tentang kepuasan yang dicari (*gratifikasi sought*) bisa kita lihat dari hasil wawancara bahwa informan dari Kopel mengaku dengan perkembangan teknologi sekarang ini dan ketersediaan media oleh

pemkab Sinjai, data-data yang tersedia dan terpublikasi belum menyentuh kebutuhan mereka.

Informan dari inspektorat Sinjai belum bisa mengakses semua tahapan lelang karena belum ada perintah dari pimpinan walaupun sudah sering mendapatkan informasi bahwa terkadang ada permainan antara panitia lelang dan penyedia barang jasa.

Beda dengan informan yang memang memanfaatkan media tersebut untuk memberikan informasi dan melaksanakan lelang. Pokja ULP sangat menyentuh kebutuhan mereka, begitu juga dengan para penyedia barang dan jasa yang ikut dalam proses lelang.

Jadi kepuasan yang didapatkan oleh para informan ini masih belum sesuai dengan kepuasan yang mereka dapatkan dari media online yang tersedia. Sistem telah diusahakan oleh tim web dan LPSE bekerja dengan sangat baik tapi konten yang diberikan terutama yang berkaitan dengan masalah transparansi pada proses lelang antara pengumuman lelang dan penentuan pemenang masih belum memenuhi keinginan dari para pencari informasi.

3. Faktor yang mempengaruhi lelang PLTS secara online.

Pemerintah dengan Perbup No. No. 4 Tahun 2011 telah mendukung pelaksanaan lelang secara online dan ditindaklanjuti dengan pembuatan surat keputusan pembentukan tim LPSE yang selalu direvisi setiap tahun.

Pelaksanaan lelang dari awal hingga akhir menggunakan media online tentu selain dukungan kebijakan harus mendapatkan pula dukungan berupa infrastruktur teknologi yang memadai serta sumber daya manusia pengelola yang terampil. Sesuai dengan teori new media yang lahir dari perkembangan teknologi khususnya dalam jaringan komputer yang menjadikan semua saling terkoneksi menjadi sebuah desa digital (*digital village*). Semua informasi disediakan dengan memberikan berkas pendukung sebagai lampiran sehingga informasi menjadi lebih akurat dan akuntabel.

Kesiapan dari tim LPSE Sinjai dalam penyediaan ruangan untuk *server* yang tersedia secara khusus tentunya dengan pendingin yang memadai serta ternyata belum terpenuhi begitu pula dengan gangguan jaringan internet masih sering terjadi. Hal ini menyebabkan penyedia kadang tidak puas dengan penggunaannya sehingga tidak sesuai dengan kepuasan yang dicarinya.

Walaupun semua informasi lelang sudah terpenuhi sesuai dengan keinginan dari penyedia termasuk cara berinteraksi sejak penjelasan lelang hingga proses sanggahan tapi tetap saja ada ketidakpuasan yang diperoleh. Gangguan informasi yang para penyedia ini biasa dapatkan berasal dari sistem dan koneksi internet. Waktu yang terprogram sesuai dengan tahapan lelang itu memang harus betul-betul diperhatikan baik oleh penyedia maupun oleh pokja ULP sebagai perencanaan waktu dan tahapan lelang.

Pencarian informasi secara online oleh masyarakat pulau sembilan terkendala dengan listrik yang hanya cukup untuk penerangan saja. Pengetahuan dan jenis pekerjaan utama mereka juga berpengaruh dengan informasi yang mereka butuhkan.

Proses lelang PLTS melalui lelang online tidak mendapat perhatian secara khusus oleh masyarakat pulau sembilan walaupun secara umum mereka sangat senang dengan keberadaan PLTS ini karena iuran bulanan berkurang dibandingkan dengan penggunaan genset yang memakai bahan bakar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemkab Sinjai telah memanfaatkan media online yang disiapkan oleh tim website Sinjai dan tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik untuk pelaksanaan lelang PLTS sejak penyediaan Rencana Umum Pengadaan hingga pelaksanaan lelang dan penentuan pemenang. Proses lelang online secara umum dilakukan pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
2. Lelang online di Pemkab Sinjai ini belum mendukung sepenuhnya transparansi dengan masih adanya tahapan-tahapan lelang yang belum bisa dilihat secara terbuka. Tahapan-tahapan yang bisa dilihat terbuka oleh umum hanya pengumuman dan pengumuman pemenang lelang.
3. Pelaksanaan lelang telah berjalan dengan lancar sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah disusun oleh pokja ULP yang didukung oleh aturan-aturan tender online oleh LKPP yang diterjemahkan menjadi peraturan Bupati Sinjai. Kendala yang timbul dari infrastruktur berupa penyediaan server, ketersediaan listrik yang cukup serta gangguan jaringan internet yang masih sering terjadi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran seperti berikut ini :

1. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang digunakan pada proses lelang di Pemkab Sinjai perlu untuk selalu diupdate ke versi terbaru dan tim LPSE harus terus berkordinasi ke LKPP untuk bisa memberikan masukan agar sistem lelang online ini menjadi semakin terbuka dan transparan dengan membuka proses lelang terutama pada laporan akhir yang dibuat oleh pokja ULP.
2. Tim website Sinjai perlu untuk terus memperbaharui informasi lelang dan keuangan terutama yang berkaitan APBD dan penyaluran dana pembangunan yang telah terealisasi.
3. Tim Website Sinjai perlu membuat halaman khusus yang berisi *feed* dari semua informasi lelang yang ada di LPSE serta menunjukkan besar penghematan anggaran yang dilakukan dengan adanya proses lelang online.
4. Tim LPSE perlu menyediakan ruang server yang lebih aman dan menjaga agar gangguan jaringan internet berkurang agar bisa menerima unggahan data dari para penyedia yang ikut lelang secara online.